



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KUALITAS
AUDIT, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PROBABILITA
LAPORAN KEUANGAN BERMASALAH**

SKRIPSI

**ADITYA KARISSA
100681063**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
SALEMBA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KUALITAS
AUDIT, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PROBABILITA
LAPORAN KEUANGAN BERMASALAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ADITYA KARISSA
1006810063**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI
SALEMBA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aditya Karissa

NPM : 1006810063

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, saya telah dibantu dan diberikan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ancella Anitawati Hermawan, S.E., MBA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan segala masukan yang Ibu berikan.
2. Kurnia Irwansyah Rais S.E., M.Ak serta Eliza Fatima S.E., M.E., CPA, selaku dewan penguji. Terima kasih atas masukan serta pengetahuan baru yang telah Bapak dan Ibu berikan.
3. Mama serta seluruh adik-adik saya, Mita, Tami, dan Ivan yang selalu memberikan doa serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk Almarhum Papa yang telah membuat saya bisa berada pada tahap ini.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya, DR. Anggita dan Ana, akhirnya kita yang duluan :'). Duo abon Ajeng dan Arum, serta Angel semoga bisa menyusul semester depan. Acit dan Nia juga semoga bisa segera menyusul. SEMangat! Terima kasih untuk kebersamaan dan kebahagiaannya selama ini. Walaupun ga lulus bareng, semoga kita sukses semua. Amin.
5. Putu Ayu Sakari, *my best skripsimate*. Terima kasih sudah menemani dan berbagi baik keceriaan, kepanikan, dan kegalauan. Mudah-mudahan kita bisa S2 bareng lagi. Thank you so much.
6. Teman-teman seperjuangan selama menyelesaikan masa perkuliahan serta *the movie goes* Evans, Herman, Wulan, Ryna, dan Rusda. *Cheers!*
7. Teman-teman DIII angkatan 2007 serta ekstensi angkatan 2010 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar di kemudian hari saya dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

Salemba, 28 Juni 2012

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Karissa
NPM : 1006810063
Program Studi : S1 Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

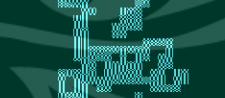
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Transaksi dengan Pihak Berelasi, dan *Financial Distress* terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif dan *Non-exclusive Royalty-Free Right* untuk disebarluaskan, diperbanyak, digunakan, dipublikasikan, dipaparkan, didistribusikan, ditransmisikan, direproduksi, difotokopi, diarsipkan, dan disebarluaskan tanpa syarat apapun, termasuk untuk tujuan komersial, dengan cara apapun dan oleh siapa saja, termasuk untuk tujuan komersial, dengan cara apapun dan oleh siapa saja.

Menandatangani pernyataan ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Menandatangani : 
No. Pendaftaran : 1006810063
Universitas Indonesia


(Aditya Karissa)

ABSTRAK

Nama : Aditya Karissa
Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi
Judul : Pengaruh Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Transaksi dengan Pihak Berelasi, dan *Financial Distress* Terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris yang diwakili oleh independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak hubungan istimewa, dan *financial distressed* terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah. Perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah dinilai berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapepam-LK.

Pengujian hipotesis dengan model regresi logistik yang menggunakan sampel sebanyak 120 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama dari tahun 2007-2011. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan transaksi dengan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Independensi dewan komisaris dan kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Sedangkan, *financial distress* mempengaruhi positif dan signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

Kata kunci:

probabilita laporan keuangan bermasalah, komposisi dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, *financial distress*

ABSTRACT

Name : Aditya Karissa
Study Program : S1 Extension Accounting
Title : The Effect of Board of Commissioners Composition, Audit Quality, Related Party Transaction, and Financial Distress on Probability of Troubled Financial Statement

This study aims to determine board of commissioners composition which is represented by board of commissioners independence, female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size, audit quality, related party transaction, financial distressed can effect probability of troubled financial statement. Companies with troubled financial statement assessed based on information obtained from Bapepam-LK.

Hypothesis testing with logistic regression model using a sample of 120 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2007-2011 The result of the this study showed that female proportion on board of commissioners, and board of commissioners size, and related party transaction does not affect the probability of troubled financial statement. Board of commissioners independence and audit quality is proven significant negative influence on probability of troubled financial statement. Thus, financial distress has positive and significant influence on probability of troubled financial statement.

Key words:

probability of troubled financial statement, board of commissioners composition, audit quality, related party transaction, financial distress

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
2. TINJAUAN LITERATUR	11
2.1 Laporan Keuangan Bermasalah.....	11
2.1.1 <i>Errors</i>	11
2.1.2 <i>Fraud</i>	11
2.2 <i>Corporate Governance</i>	14
2.3 Dewan Komisaris	16
2.3.1 Independensi Dewan Komisaris.....	16
2.3.2 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris	19
2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris	20
2.4 Kualitas Audit.....	22
2.5 Transaksi dengan Pihak Berelasi.....	23
2.5.1 Definisi Transaksi dengan Pihak Berelasi.....	24
2.5.2 Jenis-jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi.....	24
2.5.3 Hubungan Transaksi dengan Pihak Berelasi	26
2.6 <i>Financial Distress</i>	27
2.6.1 Definisi <i>Financial Distress</i>	27
2.6.2 Penyebab <i>Financial Distress</i>	28
2.6.3 Hubungan <i>Financial Distress</i> dengan Laporan Keuangan Bermasalah	29
2.7 Faktor-faktor Lainnya yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Bermasalah	30
2.7.1 Pertumbuhan Perusahaan	30
2.6.2 Umur Perusahaan	31
2.6.3 Ukuran Perusahaan.....	31
2.8 Kerangka Konseptual	32
2.9 Pengembangan Hipotesis	35

3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Model Penelitian.....	39
3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	40
3.2.1 Variabel Dependen	40
3.2.2 Variabel Independen	41
3.2.3 Variabel Kontrol.....	43
3.3 Pengujian Empiris	44
3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
3.3.2 Pengujian Hipotesis.....	45
3.3.2.1 Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>).....	45
3.3.2.2 Koefisien Determinasi (<i>Cox and Snell's R Square (R²)</i> dan <i>Nagelkerke's R square</i>).....	45
3.3.2.3 Menguji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit Test</i>)	45
3.3.2.4 Analisis Korelasi Pearson	46
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.5 Metode Pengumpulan Data	47
3.6 Jenis dan Sumber Data	47
4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian.....	48
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.3 Analisis Korelasi Pearson.....	58
4.4 Analisis Regresi Logistik	60
4.4.1 Menguji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodnes of Fit Test</i>)	60
4.4.2 Menilai Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>)	60
4.4.3 Pengujian Simultan (<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>)	61
4.4.4 Koefisien Determinasi (<i>Cox and Snell's R Square (R²)</i> dan <i>Nagelkerke's R square</i>)	62
4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	63
4.4.5.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah.....	64
4.4.5.2 Pengaruh Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah.....	65
4.4.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	66
4.4.5.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah.....	67
4.4.5.5 Pengaruh Transaksi dengan Pihak Berelasi terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah.....	68
4.4.5.6 Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	70
4.4.5.7 Pengaruh Pertumbuhan, Umur, dan Ukuran terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah.....	71
4.4.6 Pengujian Akurasi Model	72
5. KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76

5.2 Saran.....	77
DAFTAR REFERENSI	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	34
-------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	48
Tabel 4.2 Distribusi Perusahaan Sampel Berdasarkan Sektor Industri	49
Tabel 4.3 Kategori Laporan Keuangan Bermasalah	51
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.5 KAP dengan Kategori Laporan Keuangan Bermasalah	54
Tabel 4.6 Kategori Laporan Keuangan Bermasalah yang Diaudit oleh KAP <i>BIG 4</i>	55
Tabel 4.7 Kategori Laporan Keuangan Bermasalah yang Diaudit oleh KAP <i>Non BIG 4</i>	56
Tabel 4.8 <i>Pearson Correlation Matrix</i>	59
Tabel 4.9 <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	60
Tabel 4.10 <i>Likelihood Overall Fit Block Number 0</i>	61
Tabel 4.11 <i>Likelihood Overall Fit Block Number 1</i>	61
Tabel 4.12 <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Model Regresi	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Matriks Klasifikasi	73
Tabel 4.16 <i>Percentage of Accuracy</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Klasifikasi Model Regresi dengan Sampel	82
------------	---	----



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan diharuskan secara periodik menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan merupakan gambaran keadaan perusahaan yang sebenarnya dan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam membuat laporan keuangan, manajemen berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia sendiri pedoman yang digunakan adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Biasanya, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik untuk meningkatkan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah manajemen buat. Bila auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor harus menjelaskan semua alasan yang menyebabkan auditor tersebut berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Namun, pada kenyataannya saat ini banyak terjadi kasus mengenai adanya indikasi *fraud* atau kecurangan/penyimpangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun instansi yang dilakukan oleh pegawainya yang tidak terdeteksi bahkan oleh auditor independen. Kegagalan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan merupakan akibat yang serius bagi sebuah perusahaan. Tidak hanya kerugian keuangan yang mungkin didapat perusahaan, tetapi juga kerugian *non*-keuangan seperti hilangnya kepercayaan publik kepada perusahaan.

UU No. 8 tahun 1995 pasal 3 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Bapepam-LK bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bapepam-LK bertugas mengawasi berbagai kegiatan di pasar modal termasuk perusahaan yang diindikasikan laporan

keuangannya bermasalah, serta memberikan sanksi bila hal tersebut terbukti. Laporan keuangan dikatakan bermasalah jika laporan keuangan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Laporan keuangan perusahaan yang bermasalah mengindikasikan bahwa perusahaan sedang berada pada kondisi yang tidak baik. Contoh penyimpangan yang pernah terjadi di Amerika adalah kasus manipulasi akuntansi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti Enron. Dalam kasus ini manajemen Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan sedang mengalami kerugian. Hal ini dilakukan agar saham tetap diminati oleh investor. Di Indonesia, tahun 2001 terdapat skandal keuangan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Kimia Farma Tbk. Dalam kasus ini PT Kimia Farma melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan yang salah satunya digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan laporan keuangan bermasalah diantaranya terjadinya penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan oleh manajemen ataupun adanya salah saji yang material setelah dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik. Manipulasi (*fraud*) atas laporan keuangan tidak mudah ditemukan oleh auditor, apalagi jika jenis auditnya bukan merupakan audit khusus (audit investigatif).

Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang baik mengindikasikan bahwa perusahaan sudah berada pada jalur yang tepat. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia, *corporate governance* semakin menjadi perhatian akibat banyak terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan. Studi empiris yang dilakukan oleh Beasley (1996) mengindikasikan lemahnya *corporate governance* berpengaruh terhadap penyimpangan (*fraud*) atas laporan keuangan. Mekanisme pengawasan manajemen baik internal (berdasarkan organisasi) maupun eksternal (berdasarkan pasar) diwajibkan (Walsh dan Seward, 1990). Dewan komisaris dan komite audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan internal untuk

melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Di sisi lain, kepemilikan pihak luar, *monitoring debtholder*, serta peraturan pemerintah merupakan mekanisme pengawalan eksternal yang membantu internal untuk pengawasan perusahaan secara efektif.

Upaya yang harus dilakukan untuk permasalahan laporan keuangan yang bermasalah adalah dengan melakukan pencegahan. Hal ini dapat dimulai dari sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam hal ini dewan komisaris dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif untuk mencegah munculnya laporan keuangan yang bermasalah. Dewan komisaris merupakan faktor utama dari *corporate governance*, karena bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Luo He, *et al.* (2008) menemukan bahwa *board*¹ merupakan pencegah yang paling efektif dalam laporan keuangan yang mengalami penyimpangan (*fraud*). Ini menunjukkan dengan adanya dewan komisaris yang merupakan bagian dari struktur *corporate governance* diharapkan memiliki peran yang efektif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah.

Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh dewan komisaris adalah independensi. Zanani *et al.* (2008) menyatakan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan adalah *statutory audit* dimana tujuannya adalah untuk menyediakan verifikasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dengan dewan komisaris yang independen diharapkan terciptanya iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*”.

Yatim *et al.* (2006) menyatakan semakin besar keragaman dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, hal ini karena adanya kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris dan direksi yang berjumlah banyak. Akan tetapi keragaman tersebut dapat memberikan

¹ Indonesia menganut struktur dewan *two-tier system*, yaitu dewan pengawas dewan komisaris dan dewan direksi dimana dewan komisaris berperan dalam memberikan supervisi dan mengawasi dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Pada penelitian di negara lain kebanyakan menganut *one-tier system*. Istilah *board of directors* berbeda dengan yang ada di Indonesia, namun perannya dapat dikatakan sama dengan peran dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, istilah *board* akan digunakan untuk *board of directors* dalam *one-tier system*, sedangkan dewan komisaris untuk perusahaan yang menganut *two-tier system*.

alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Keragaman komposisi anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan dapat dilihat dari sisi *gender*, usia dan latar belakang pendidikan anggota dewan perusahaan. Krishnan *et al.* (2005) dan Adams dan Ferreira (2009) menemukan bahwa keragaman *gender* akan memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat berkurang.

Ukuran dewan komisaris juga dinilai dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Yermack (1996) memaparkan bahwa semakin banyaknya orang yang menjadi *board* dapat berakibat makin buruknya kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan ukuran dewan yang besar akan lebih sulit berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan termasuk dalam mengendalikan tindakan manajemen, sehingga membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akibatnya, akan sulit melakukan pendeteksian bila terdapat kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan.

Timbulnya berbagai kasus kecurangan menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat pasar uang dan pasar modal. Auditor eksternal (akuntan publik) sebagai pihak independen memiliki tugas untuk memberikan opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya ini, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor yang berkualitas juga. Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi bisa didapatkan dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011).

Transaksi dengan pihak berelasi² banyak disorot terkait dengan banyaknya perusahaan yang jatuh karena melakukan skandal dengan menggunakan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi. Salah satu kasus yang cukup mencuat adalah jatuhnya Enron berkaitan dengan adanya transaksi pihak berelasi dengan *Special Purpose Entity* (SPE) yang juga merupakan CEO dari Enron (Wall Street Journal, 12 Desember 2001). Scott (1999) dalam Feliana (2007) menemukan bahwa lebih dari setengah sampel perusahaan Indonesia memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Hal ini memunculkan dugaan adanya *expropriation* kepentingan pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas melalui transaksi dengan pihak berelasi. Sehingga ini memungkinkan terjadinya “permainan” pada laporan keuangan.

Pada saat krisis, pinjaman merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dilakukan perusahaan. Namun pinjaman dapat menyebabkan perusahaan bangkrut jika tidak dapat dikelola dengan baik, karena terdapat kewajiban di masa yang akan datang yang dimiliki perusahaan untuk diselesaikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan tersebut adalah *financial distress*. Kondisi *financial distress* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, dengan kata lain perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Maksimovic dan Titman (1991) bahwa pemegang saham pada perusahaan dengan kondisi *financial distress* memiliki insentif untuk memangkas biaya dan mengurangi kualitas produk perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dengan cepat. Sehingga terdapat kemungkinan terdapat pengaturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan keadaan sebenarnya

Penelitian lebih lanjut ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap pengaruh variabel independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan

² PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi menyempurnakan definisi pengungkapan untuk pihak-pihak berelasi dari PSAK No. 7 (1994) tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. PSAK No. 7 (Revisi 2010) baru berlaku efektif pada 1 Januari 2011, sedangkan sampel yang digunakan terdiri dari data perusahaan tahun 2007-2011. Dengan demikian pada penelitian ini digunakan istilah pihak berelasi serta peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No. 7 (1994).

komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan kondisi *financial distress* terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?
2. Apakah proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?
5. Apakah transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?
6. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

2. Pengaruh proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.
4. Pengaruh kualitas audit terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.
5. Pengaruh transaksi dengan pihak berelasi terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.
6. Pengaruh *financial distress* terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh:

- Perusahaan

Memberikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan – kebijakan perusahaan serta sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Selain itu perusahaan diharapkan meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *corporate governance* di lingkungan perusahaannya.

- Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk pengambilan keputusan investasi, khususnya pada pemilihan perusahaan setelah mengetahui perilaku manajemen dalam perusahaan tersebut.

- Regulator

Regulator dalam penelitian ini adalah Bapepam-LK. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan kajian bagi regulator untuk membuat kebijakan yang lebih mendukung dalam perkembangan tata kelola perusahaan yang baik

- Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan kondisi *financial distress* dan probabilita laporan keuangan yang bermasalah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan kondisi *financial distress* terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah pada perusahaan non keuangan di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2007 – 2011.

1.6 Sitematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

- **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang dijelaskan mengenai alasan dan teori yang mendasari pemilihan tema dalam penelitian ini. Pada perumusan masalah disajikan beberapa pertanyaan yang bersumber dari

Universitas Indonesia

latar belakang penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan dan sasaran penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini. Manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak. Ruang lingkup penulisan merupakan batasan dalam penulisan. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang menjelaskan alur dari penelitian secara keseluruhan.

- **BAB 2 Tinjauan Literatur**

Bab ini membahas mengenai konsep-konsep dan landasan-landasan yang dijadikan dasar mengenai objek penelitian yang diperoleh dari berbagai studi literatur, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian yang meliputi laporan keuangan bermasalah, dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan kondisi *financial distress*. Teori yang dibahas dalam bab ini akan digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

- **BAB 3 Metode Penelitian**

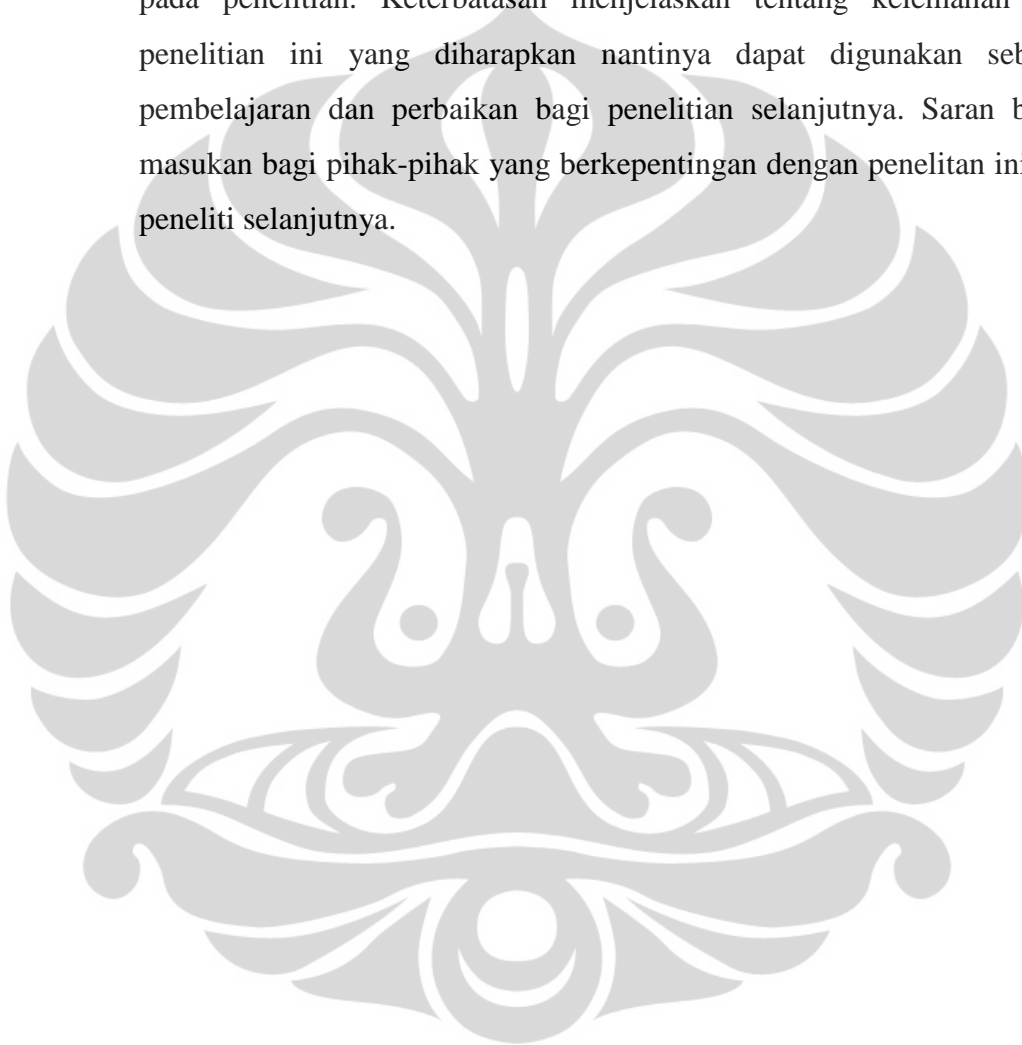
Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai data, variabel yang digunakan dalam penelitian, serta model penelitian. Data dan periode penelitian ini mencakup data dan periode yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Variabel penelitian menjelaskan tentang semua variabel dependen, independen, dan kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian mencakup tentang metode yang digunakan untuk mengolah sampel data pada penelitian ini.

- **BAB 4 Analisis Pembahasan**

Bab keempat ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pengolahan data dengan menjelaskan proses pengolahan statistika data-data yang sesuai dengan model penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan tentang analisa hasil penelitian yang mencakup pembahasan dan interpretasi dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

- **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan-keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang membaca penelitian ini, atau pun yang bermaksud mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Kesimpulan mencakup rangkuman dari proses dan hasil pengolahan data pada penelitian. Keterbatasan menjelaskan tentang kelemahan dari penelitian ini yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai pembelajaran dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Saran berisi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini dan peneliti selanjutnya.



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan Bermasalah

Di dalam pelaporan keuangan terdapat kemungkinan salah saji (*misstatement*), yang apabila material akan mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini dapat terjadi baik berupa *errors* (kekeliruan) ataupun *fraud* (kecurangan).

2.1.1 Errors

Arens *et al.* (2009) dalam bukunya “*Auditing and Assurance Service: An Inonesia adaptation*” menyatakan kekeliruan (*errors*) adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja (*unintentional*). Contoh dari *errors* adalah kesalahan perhitungan harga kali kuantitas pada faktur penjualan serta telah salah melihat bahan baku yang terlalu lama dalam menentukan nilai terendah antara harga perolehan atau harga pasar untuk menilai persediaan. *Error* pada laporan keuangan dapat diperbaiki dengan cara mengganti dengan angka yang benar pada tahun setelah kesalahan terjadi.

2.1.2 Fraud

Kecurangan (*fraud*) adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja (*intentional*) (Arens *et al.*, 2009). *Fraud* lebih sulit dideteksi dan dikendalikan dibandingkan *errors*.

Menurut *Black’s Law Dictionary* yang diterjemahkannya secara tidak resmi menyatakan bahwa:

“*Fraud* didefinisikan sebagai kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan;

tindakan penyajian yang salah atau keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh atau tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh atau tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.”

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *fraud* timbul karena adanya kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu keadaan yang disembunyikan dari fakta material yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan yang salah. *Fraud* bukan sesuatu yang dapat diabaikan, karena jika dibiarkan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan cacat atas laporan keuangan.

Di dalam PSA No. 70 (SA Seksi 316) terdapat dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan (*fraud*), yaitu yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen biasanya melakukan kecurangan untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*), seperti manipulasi, pemalsuan, atau perubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Sedangkan karyawan/pegawai melakukan kecurangan untuk kepentingan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of asset*). Contoh dari salah saji jenis ini adalah penggelapn terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, *mark-up* harga, dan transaksi “tidak resmi”.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Hal ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang aling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung.

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Jenis *fraud* ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan (*window dressing*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti melakukan suap. Hal ini banyak terjadi di negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik. Jenis *fraud* ini meliputi penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Arens *et al.* (2009) dalam bukunya “*Auditing and Assurance Service: An Inonesia adaptation*” menyebutkan tiga elemen kunci yang disebut sebagai segitiga *fraud* (*fraud triangle*) yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan *fraud* yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan alasan pembenaran (*rationalization*). Tekanan dan alasan pembenaran lebih terkait pada kondisi kehidupan dan mental pribadi seseorang, sedangkan elemen kedua terkait dengan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan seperti masalah keuangan, sifat buruk (penjudi dan pecandu narkoba), dan lingkungan pekerjaan seperti kondisi kerja yang buruk. Sedangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya kesempatan seseorang untuk melakukan *fraud* adalah sistem pengendalian internal yang lemah, tidak adanya kriteria pengukuran kualitas kerja, kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya, serta kurang atau tidak adanya *audit trail* (jejak audit). Dan yang membuat seseorang mencari pembenaran atas tindakan melakukan *fraud* antara lain karena mencontoh atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi atau perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak

seberapa, dan dianggap hanya sekadar meminjam dan akan dikembalikan pada waktunya.

2.2 *Corporate Governance*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan kontrak yang timbul antara pemilik dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan atas nama pemilik. Dengan adanya hubungan keagenan, ada sebuah kondisi dimana agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan kontrak ini mengakibatkan agen mempunyai informasi yang melebihi pemilik dan memungkinkan untuk bertindak memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Ini menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik dalam hal ini adalah pemegang saham dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen (direksi) yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Hal ini merupakan landasan dari penerapan *good corporate governance* sebagai sistem pengawasan dan pengendalian (*check and balances*) perusahaan. Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan (Jensen, 1993).

Forum Corporate Governance for Indonesia (FCGI, 2000) mendefinisikan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan Cadbury Committee, yaitu:

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Manajemen perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menguraikan bahwa prinsip-prinsip yang harus dimiliki yaitu:

- *Transparency* (Transparansi)

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

- *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dikelola secara benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

- *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

- *Independency* (Kemandirian)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006).

2.3 Dewan Komisaris

Mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan suatu perusahaan. Dewan memegang peran yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan. Di Indonesia, struktur dewan dalam perusahaan menganut sistem dua tingkat (*two tiers system*). Tidak seperti di negara-negara Eropa yang menganut sistem satu tingkat (*one tiers system*) dimana hanya terdapat satu dewan (*board*) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif yang tidak terdapat perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain, dalam *two tier system* perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris serta menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen serta tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

UU PT No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih. Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2000), dewan komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari *corporate governance* yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, dewan komisaris harus mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat dengan keadaan sebenarnya dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja.

2.3.1 Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris harus menjunjung independensi. Independensi dewan komisaris diartikan adanya sikap yang tidak memihak dalam melakukan pengawasan. Bapepam dan LK memberikan

gambaran mengenai syarat dewan komisaris independen yaitu dewan komisaris tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan, dengan dewan direksi atau anggota komisaris lainnya serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Keberadaan dewan komisaris dalam hal pengawasan sangat diperlukan dan menjadi sangat penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan berbagai kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat dalam pembiayaan usahanya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Oleh karena itu dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat mendorong terciptanya kondisi yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan di berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan *good corporate governance* telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep 315/BEJ/06-2000 perihal peraturan No. I-A, mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas. Pada peraturan tersebut disebutkan, perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak terkait

Dalam peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- e. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Tugas dewan komisaris dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah harus mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat dengan keadaan sebenarnya dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja. Luo He *et al.* (2008) menemukan bahwa independensi *board* merupakan pencegah yang paling efektif agar laporan keuangan tidak mengalami penyimpangan (*fraud*). Sun *et al.* (2012) menemukan bahwa semakin tingginya jumlah *board* independen, perusahaan cenderung mengungkapkan pengendalian internalnya pada laporan audit. Dengan demikian, peluang manajemen untuk menutupi kecurangan yang dilakukan akan semakin kecil.

Sebagai salah satu unsur terpenting dari *corporate governance*, dewan komisaris harus menjunjung independensi atau tidak memihak dalam melakukan pengawasan. Sikap independensi ini diharapkan memiliki peran yang efektif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah. Beasley (1996) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Linck *et al.* (2008) menemukan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki *board* dengan ukuran lebih kecil namun lebih independen dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Uzun *et al.* (2004) menemukan bahwa tingginya proporsi *independent outside director* dapat mengurangi *fraud* pada perusahaan.

2.3.2 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Corporate governance akan semakin baik jika komposisi *board* bersifat heterogen sehingga akan saling melengkapi kompetensi dan kredibilitas satu dengan lainnya (Syakhroza, 2004). Perusahaan yang dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya adalah perusahaan yang memiliki budaya mendukung adanya keragaman di tempat kerja. Semakin besar keragaman dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, hal ini karena adanya kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris dan direksi yang berjumlah banyak (Yatim *et al.*, 2006). Akan tetapi keragaman tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Salah satu bentuk keragaman tersebut adalah *gender*. Pria dan wanita pada dasarnya melakukan sosialisasi dengan cara yang berbeda. Hal ini dipengaruhi dalam kegiatan sosialnya seperti di tempat kerja dan cara mereka mengelola organisasi untuk mencapai tujuannya.

Jurkus *et al.* (2010) menemukan bahwa keragaman *gender* akan memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik. Untuk dapat mengakomodasi adanya keragaman gender diperlukan pemahaman bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Namun pada kenyataannya terdapat fenomena *glass ceiling*. Fenomena *glass ceiling* merupakan batas semu yang menjadi penghalang berkembangnya karir wanita. Secara kasat mata, memang tidak ada ketentuan yang mengatakan karyawan wanita tidak dimungkinkan untuk meraih posisi puncak, namun realita yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Catalyst (2010) dalam Skaggs *et al.* (2012), menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk memasukkan atau menambah *female representation* dalam struktur *board* nya.

Tumbuhnya kesempatan bagi wanita pada *top level* ini kemungkinan merupakan hasil dari beberapa faktor utama. Sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, organisasi semakin ditekan untuk membuat, secara simbolis atau sebaliknya keragaman yang lebih besar di tempat kerja. Untuk menanggapi tekanan yang berasal dari pergeseran norma-norma sosial tentang keragaman ini, perusahaan cenderung melakukan perubahan pada komposisi gender dan ras dalam *board* mereka dalam upaya untuk mempertahankan legitimasi terutama di pasar yang sangat kompetitif (Cassell, 1997; Elgart, 1983; Natividad, 2005; Rose dan Bielby, 2011 dalam dalam Skaggs *et al.* (2012)). Sehingga seiring dengan berjalannya waktu kesempatan bagi wanita untuk berada pada *top level* terus meningkat. Keragaman *board* dapat dipromosikan sebagai alat untuk menarik lebih banyak pegawai yang memiliki kualifikasi di semua tingkat organisasi (Skaggs *et al.*, 2012).

Marcus (2010) menyatakan bahwa keragaman pada dewan direksi perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena terdapatnya keragaman dalam hal pemikiran, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, perspektif dan usia sehingga memungkinkan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda seperti pemahaman risiko dan pengambilan solusi yang paling tepat karena pada dasarnya wanita cenderung memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Adams dan Ferreira (2002) mengemukakan bahwa *female representation* dalam *board* dapat memberikan perspektif, pengalaman, dan opini yang berbeda. Dalam penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Adams dan Ferreira (2009), menunjukkan direktur wanita memiliki efek nilai yang substansial dan relevan dalam struktur *board*. Termasuk dalam input *board* dan output perusahaan.

2.3.3 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pentingnya peran dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) menimbulkan pertanyaan, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan? Apakah dengan semakin

banyak anggota dewan komisaris perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi sehingga mengurangi probabilita laporan keuangan bermasalah? Suatu argumen menyatakan bahwa semakin banyaknya jumlah dewan komisaris dapat menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Alexander *et al.*, 1993; Goostein *et al.*, 1994; Mintzberg, 1983 dalam Wardhani, 2006), yaitu bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewan untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan baik. Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Wardhani (2006) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Beasley (1996) menemukan ukuran *board* berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan. Perusahaan besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pengeluaran untuk R&D yang tinggi cenderung memiliki *board* dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil (Linck *et al.*, 2008).

Namun di sisi lain, jumlah dewan komisaris yang besar terkait dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi serta kordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan turunnya kemampuan dewan komisaris untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan sistem kontrol (Jensen, 1993). Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan. Banyak penelitian menyatakan bahwa semakin banyak personel yang menjadi dewan komisaris, makin buruk kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan Yermarck (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) menyimpulkan bahwa *board* yang berukuran lebih kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan *board* yang berukuran besar.

Dengan menggunakan sampel perusahaan Finlandia, Eisenberg *et al.* (1998) dalam Wardhani (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Namun, Uzun *et al.*

(2004) dan Chen *et al.* (2006) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan dan tidak melakukan kecurangan tidak menemukan hubungan ukuran *board* yang lebih besar mempengaruhi keefektifan dalam pengawasan atas kecurangan.

2.4 Kualitas Audit

Adanya asumsi bahwa manusia selalu *self-interest* maka sangat diperlukan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara pemilik dan agen, dalam hal ini adalah auditor independen. Auditor sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik melalui laporan keuangan. Dengan adanya auditor independen, investor akan lebih yakin pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi (AAA Financial Accounting Commite, 2000 dalam Christiawan, 2002). Seorang auditor dikatakan kompeten jika mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. Kompetensi bisa dimulai didapatkan dari pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup sehingga dapat mencakup semua aspek baik teknis maupun pendidikan umum. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) mengharuskan auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan untuk memihak dan harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan.

De Angelo (1981) menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan dengan auditor skala kecil. Hylas dan Robert (1982) menyatakan permasalahan yang dihadapi klien seperti tidak adanya pengalaman atau ketidakmampuan dalam praktek akuntansi berpengaruh terhadap *error*. Sebagian besar *error* pada laporan keuangan pada awalnya ditandai dengan kurang ketatnya prosedur audit seperti *analytical review* dan diskusi dengan klien. Kantor Akuntan Publik (KAP) besar lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses di pengadilan. Ini berarti bahwa KAP besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan laporan keuangan yang bermasalah.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan dengan ukuran KAP membuktikan bahwa ukuran KAP yang besar dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih baik (Ireland dan Lennox, 2002; Francis 2004; Farbar 2005). Carcello dan Albert (2004) menghubungkan spesialisasi industri auditor dengan *fraud* atas laporan keuangan dan hasil penelitian membuktikan terdapat hubungan yang signifikan negatif antara spesialisasi industri auditor dengan *fraud* atas laporan keuangan. Hubungan antara kualitas audit dengan laporan keuangan bermasalah diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Ming (2009) yang menemukan bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola internal yang lebih lemah cenderung memilih auditor berkualitas rendah sehingga dapat menutupi dan mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan auditor tidak dapat menangkap adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

2.5 Transaksi dengan Pihak Berelasi

Hubungan dengan pihak berelasi merupakan suatu karakteristik yang normal dalam perdagangan dan bisnis. Suatu hubungan dengan pihak berelasi dapat

berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya pihak berelasi bila terdapat pengendalian (*control*), sehubungan dengan transaksi antara pihak berelasi.

Dalam keadaan hubungan dengan pihak berelasi, entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi *investee* melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan. Sehingga pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi harus dilakukan agar pembaca laporan keuangan bisa mendapatkan gambaran tentang pengaruh dengan pihak berelasi.

2.5.1 Definisi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (IAI, 2010) pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami adanya dampak dari pihak berelasi pada suatu entitas, maka penting untuk mengungkapkan pihak berelasi ketika pengendalian itu ada. Transaksi dengan pihak berelasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (IAI, 2010) adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

2.5.2 Jenis-jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam PSAK No. 7 (IAI, 2010), terdapat beberapa jenis transaksi dengan pihak berelasi yang biasanya terjadi dalam suatu perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni :

- a. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- b. Pembelian atau penjualan properti dan aset lainnya
- c. Penyediaan atau penerimaan jasa

- d. Sewa
- e. Pengalihan riset dan pengembangan
- f. Pengalihan di bawah perjanjian lisensi
- g. Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau dalam bentuk natura)
- h. Provisi atas jaminan atau agunan
- i. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi dimasa depan, termasuk kontrak eksekutori
- j. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi

Sedangkan menurut Cheung *et al.*, (2006) transaksi dengan pihak berelasi dalam penelitiannya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Transaksi yang bersifat *a priori* atau kemungkinan menimbulkan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas, seperti :
 - a) Penjualan asset
 - b) Penjualan ekuitas
 - c) Hubungan perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa
 - d) Akuisisi asset
- b. Transaksi yang bermanfaat dan cenderung menguntungkan pemegang saham minoritas, seperti :
 - a) Penerimaan tunai, dapat berupa pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan dukungan dana tunai
 - b) Hubungan dengan anak perusahaan, dapat berupa akuisisi, penjualan asset dan ekuitas, dan hubungan perdagangan lainnya.
- c. Transaksi dengan alasan strategik dan mungkin tidak merugikan, seperti :
 - a) Penawaran *takeover* dan *joint venture*
 - b) Akuisisi anggota *joint venture*
 - c) Penjualan ke anggota *joint venture*

2.5.3 Hubungan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai *opportunis* atau sebagai transaksi yang efisien. Berdasarkan beberapa penelitian seperti Gordon *et al.* (2004) dan Kholbeck dan Mayhew (2004), secara umum menjelaskan transaksi dengan pihak berelasi lebih dipandang sebagai transaksi untuk kepentingan *opportunis* dibandingkan untuk tujuan efisiensi perusahaan. Sebagai transaksi yang *opportunis* dalam hal transaksi dengan pihak berelasi menyebabkan konflik kepentingan yang konsisten dengan *agency theory*. Transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai alat untuk *expropriation of the firm's resources*. Hipotesis lain menyatakan transaksi dengan pihak berelasi merupakan transaksi yang dilakukan dalam pertimbangan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Deng *et al.* (2006) dalam Feliana (2007) membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas melakukan “*firm expropriation resources at the expense of the minority shareholder*”. *Expropriation* yang mereka lakukan salah satunya melalui transaksi dengan pihak berelasi. Dengan munculnya dugaan adanya *expropriation* ini memungkinkan terjadinya “permainan” pada laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Semakin tingginya frekuensi atas transaksi dengan pihak berelasi dapat mencerminkan resiko kecurangan yang tinggi (Beasley *et al.*, 2010). Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan pengujian bagaimana pengaruh transaksi dengan pihak berelasi dengan *fraud*. Louwers *et al.* (2008) menyimpulkan kegagalan audit dalam mengindikasikan *fraud* atas laporan keuangan terkait transaksi dengan pihak berelasi adalah karena kurangnya sikap *skepticism* dan *due professional care* yang dimiliki oleh auditor. Namun, Henry *et al.* (2007) menemukan bahwa hubungan transaksi dengan pihak berelasi tidak bermanfaat dalam mekanisme terjadinya *fraud* dan keberadaannya tidak mengindikasikan *fraud* atas laporan keuangan.

2.6 *Financial Distress*

2.6.1 Definisi *Financial Distress*

Financial distress terjadi saat perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek dimana perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Banyak penelitian yang mengartikan *financial distress* dengan hal yang berbeda-beda. Menurut Platt dan Platt (2002) *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Elloumi dan Gueyie (2001) mengategorikan perusahaan yang selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negatif sebagai kondisi *financial distress*. Classens *et al.* (1999) dalam Wardhani (2006) menggunakan *interest coverage ratio* yang kurang dari satu untuk mendefinisikan *distressed*.

Brigham dan Gapenski (1997) mendefinisikan kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress* sebagai berikut :

1. *Economic failure* adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of capitalnya*.
2. *Business failure* merupakan keadaan dimana operasional perusahaan terhenti karena adanya kerugian kepada kreditur.
3. *Technical insolvency* adalah keadaan saat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan survive. Di sisi lain, jika *technical insolvency* adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju bencana keuangan (*financial disaster*).
4. *Insolvency in bankruptcy*, yakni keadaan dimana nilai buku hutang perusahaan melebihi nilai pasar asset yang dimiliki perusahaan. Kondisi ini lebih serius daripada *technical insolvency* karena pada umumnya keadaan ini merupakan tanda *economic failure*. Bahkan keadaan ini dapat mengarah kepada likuidasi bisnis.

5. *Legal bankruptcy*, merupakan keadaan dimana perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Di Indonesia kepailitan (*failure*) diatur dalam UU. No.1 tahun 1998, disebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Permohonan ini dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

2.6.2 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Damodaran (1997), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Hal ini dapat berupa:

a. Kesulitan arus kas

Hal ini disebabkan karena tidak imbangnya antara aliran penerimaan dengan pengeluaran uang dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan menjadi defisit.

b. Besarnya jumlah utang

Sekilas, perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan dengan pinjaman bank dapat mengatasi kondisi defisit arus kas, namun akan timbul permasalahan baru di masa depan yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman jika perusahaan tidak melakukan perencanaan yang matang sebelumnya.

c. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Situasi seperti ini harus mendapatkan perhatian manajemen dengan seksama dan memerlukan perencanaan jangka panjang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar perusahaan yang bersifat makro ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. Hal ini dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman. Hal seperti ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan.

Kondisi *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*) sehingga tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan jika tidak dibuat perencanaan-perencanaan yang tepat. Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* adalah:

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.
2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.
3. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan ada masa yang akan datang.

2.6.3 Hubungan *Financial Distress* dengan Laporan Keuangan Bermasalah

Jika manajemen menghadapi permasalahan keuangan yang cukup substansial, seperti kegagalan perusahaan, manajemen mungkin memilih jalan singkat, yaitu melakukan *fraud* atau kecurangan seperti dengan memanipulasi laporan keuangan. Maksimovic dan Titman (1991) menunjukkan bahwa pemegang saham pada perusahaan dengan kondisi *financial distressed* memiliki insentif untuk memangkas biaya dan mengurangi kualitas produk perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dengan cepat. Ini menunjukkan ada kemungkinan terdapat pengaturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.

Performa keuangan yang buruk seringkali menyebabkan manajemen untuk menempatkan tekanan yang tidak semestinya pada pendapatan dan laba, dengan demikian meningkatkan kemungkinan kecurangan pada laporan keuangan. Thorburn's (2000) menemukan bahwa kecenderungan likuidasi lebih tinggi untuk perusahaan yang melakukan *fraud* pada praktik akuntansinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik dan manajer perusahaan terlibat dalam *fraud* atas laporan keuangan atau aktivitas kriminal lainnya yang dapat mengurangi kecenderungan untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup perusahaan.

Bell *et al.* (1991) dalam Beasley (1996) menyatakan bahwa performa keuangan yang buruk meningkatkan kemungkinan kecurangan keuangan. Namun Beasley (1996) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara performa keuangan yang buruk dengan kecurangan keuangan. Hasil yang serupa juga didapatkan oleh Uzun *et al.* (2004).

2.7 Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Bermasalah

2.7.1 Pertumbuhan Perusahaan

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan lebih tinggi, menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Tekanan ini memungkinkan untuk meningkatkan kemungkinan manajemen melakukan praktik kecurangan untuk mempertahankan tingginya tingkat pertumbuhan perusahaan, seperti menaikkan nilai penjualan ataupun mengurangi nilai harga pokok penjualan.

Selain itu, Bell *et al.* (1991) memaparkan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan sebuah "*red flag*" bahwa terdapat indikasi adanya kecurangan. Jika perusahaan selalu mengalami pertumbuhan dengan cepat, manajemen akan termotivasi untuk *misstate* laporan keuangan pada saat terjadi kecenderungan penurunan untuk membuat pertumbuhan tetap terlihat stabil. Carcello dan Albert (2004) menemukan bahwa terdapat hubungan yang

positif antara pertumbuhan perusahaan dengan kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan.

2.7.2 Umur Perusahaan

Beneish (1999) dalam Carcello dan Albert (2004) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki kecenderungan terdaftar dalam bursa efek. Perusahaan publik menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mencapai target laba, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan kecurangan.

Semakin lama perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik (terdaftar di bursa efek), maka perusahaan tersebut semakin patuh terhadap peraturan-peraturan yang terdapat di bursa efek (Beasley, 1996). Dengan kata lain, kemungkinan perusahaan yang baru terdaftar ke dalam bursa efek cenderung melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Carcello dan Albert (2004) juga menemukan hal serupa, yaitu terdapat hubungan yang signifikan positif antara umur perusahaan dengan kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.

2.7.3 Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena akan lebih sulit untuk melakukan pengawasan sehingga dibutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Namun di sisi lain, perusahaan kecil dapat memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal dan membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar dari para pemegang saham, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan kecurangan.

Dalam Beasley (1996) dikatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara ukuran perusahaan dengan laporan keuangan *fraud*. Hal serupa diungkapkan oleh Carcello dan Albert (2004) yang menilai ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural *total asset* perusahaan pada akhir periode laporan keuangan, dan menemukan terdapat hubungan yang signifikan positif antara umur perusahaan dengan kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan. Ukuran perusahaan ditunjukkan dengan *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan.

2.8 Kerangka Konseptual

Praktek *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi probabilita laporan keuangan bermasalah. Salah satu elemen untuk menciptakan *good corporate governance* adalah dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Agar *board governance* menjadi efektif salah satu atribut yang harus dimiliki adalah dengan adanya komposisi *board*. Pada penelitian ini independensi, proporsi wanita, dan ukuran dewan komisaris digunakan sebagai variabel independen. Dewan komisaris dalam kaitannya dengan laporan keuangan bertugas mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan terhindar dari segala bentuk kecurangan. Hal ini diperkuat oleh Luo He *et al.* (2008) yang menemukan bahwa independen *board* merupakan pencegah yang paling efektif agar laporan keuangan tidak mengalami penyimpangan (*fraud*). Sebagai pengawas, dewan komisaris harus bersifat independen tanpa memihak kepada siapapun agar informasi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen menunjukkan keadaan sebenarnya dan bebas dari kecurangan. Beasley (1996) dan Uzun *et al.* (2004) menemukan bahwa *independent outside director* dapat mengurangi *fraud* pada perusahaan.

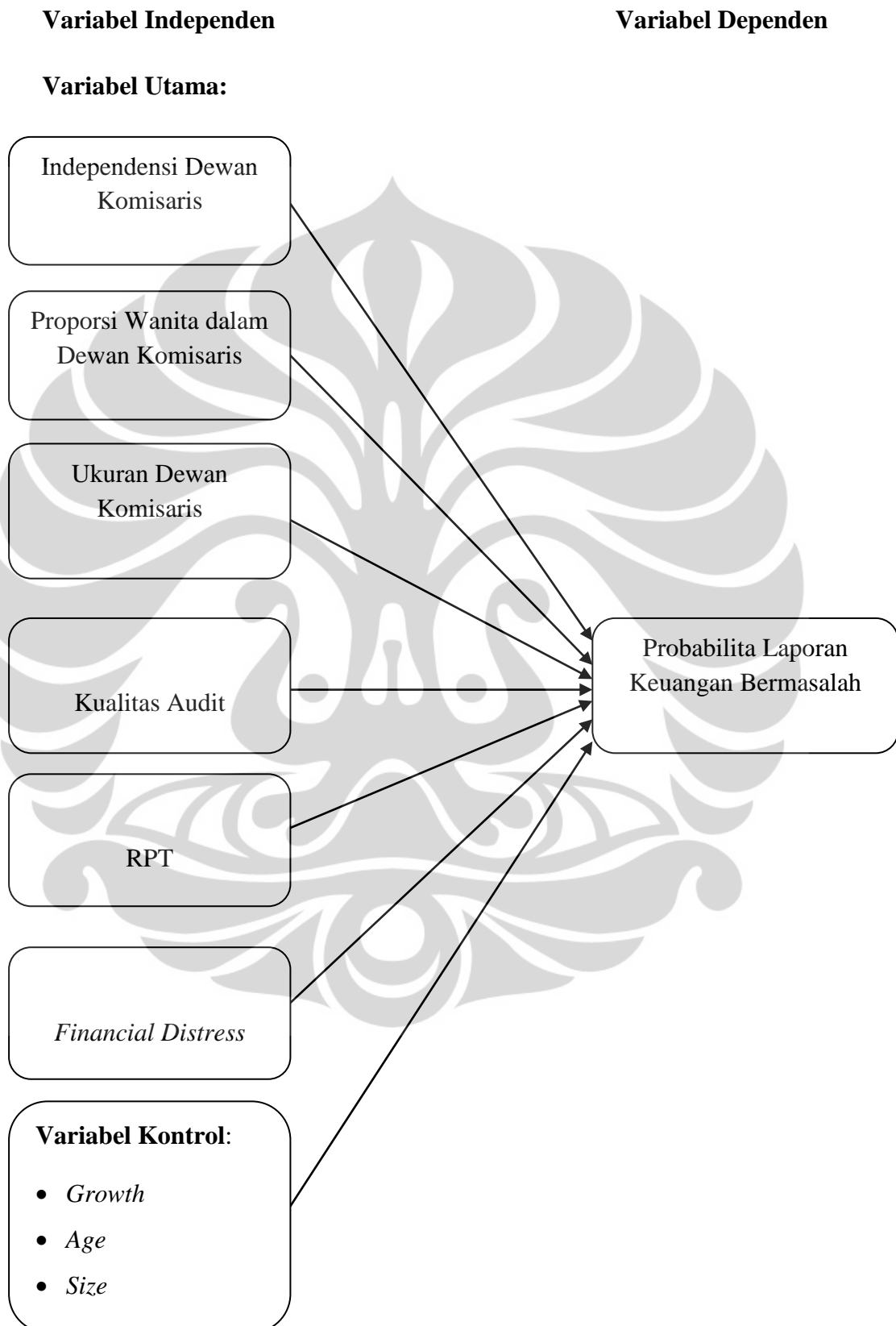
Pada dasarnya wanita cenderung memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sehingga keberadaan wanita cukup memiliki pengaruh dalam *board*. Hal ini dibuktikan oleh Jurkus *et al.* (2010) yang menemukan bahwa keragaman *gender* akan

memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik. Selain itu, ukuran dewan komisaris juga memiliki pengaruh terhadap probabilita laporan keuangan. Yermarck (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) menyimpulkan bahwa *board* yang berukuran lebih kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan *board* yang berukuran besar.

Kualitas audit seringkali dikaitkan dengan ukuran KAP. KAP yang besar dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih baik (Ireland dan Lennox, 2002; Francis 2004; Farbar 2005). Kantor Akuntan Publik (KAP) besar lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa KAP besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan laporan keuangan yang bermasalah.

Transaksi dengan pihak berelasi (RPT) dapat digunakan sebagai alat untuk *expropriation of the firm's resources*. Dengan munculnya dugaan adanya *expropriation* ini memungkinkan terjadinya “permainan” pada laporan keuangan. Beasley *et al.* (2010) menyatakan semakin tingginya frekuensi atas transaksi dengan pihak berelasi dapat mencerminkan resiko kecurangan yang tinggi. Performa keuangan yang buruk seringkali menyebabkan manajemen untuk menempatkan tekanan yang tidak semestinya pada pendapatan dan laba, dengan demikian meningkatkan kemungkinan kecurangan pada laporan keuangan. Kondisi *financial distress* menunjukkan bahwa performa keuangan perusahaan yang buruk. Bell *et al.* (1991) dalam Uzun *et al.* (2004) menyatakan performa keuangan yang buruk meningkatkan penyimpangan pada laporan keuangan. Pertumbuhan, umur, dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.9 Pengembangan Hipotesis

Tugas dewan komisaris dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah harus mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat dengan keadaan sebenarnya dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja. Dewan komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari *corporate governance*. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris harus menjunjung independensi atau tidak memihak dalam melakukan pengawasan. Sikap independensi ini diharapkan memiliki peran yang efektif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah.

Luo He *et al.* (2008) menemukan bahwa independensi *board* merupakan pencegah yang paling efektif agar laporan keuangan tidak mengalami penyimpangan (*fraud*). Beasley (1996) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Linck *et al.* (2008) menemukan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki *board* dengan ukuran lebih kecil namun lebih independen dibandingkan dengan perusahaan kecil. Uzun *et al.* (2004) menemukan bahwa tingginya proporsi *independent outside director* dapat mengurangi *fraud* pada perusahaan. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{1a} : Tingkat independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah

Semakin besar keragaman dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, hal ini karena adanya kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris dan direksi yang berjumlah banyak (Yatim *et al.*, 2006). Akan tetapi keragaman tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Marcus (2010) menyatakan bahwa keragaman pada dewan direksi perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena terdapatnya keragaman dalam hal pemikiran, pengalaman, pengetahuan, pemahaman,

perspektif dan usia sehingga memungkinkan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda seperti pemahaman risiko dan pengambilan solusi yang paling tepat karena pada dasarnya wanita cenderung memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Penelitian dengan hasil serupa didapatkan Jurkus *et al.* (2010) menemukan bahwa keragaman *gender* akan memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{2a} : Proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah

Perusahaan besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pengeluaran untuk R&D yang tinggi cenderung memiliki *board* dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil (Linck *et al.*, 2008). Banyak penelitian menyatakan bahwa semakin banyak personel yang menjadi dewan komisaris, makin buruk kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena dengan ukuran dewan yang besar akan lebih sulit berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan komisaris, sehingga membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan Yermarck (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) menyimpulkan bahwa *board* yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan *board* berukuran besar. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{3a} : Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil memiliki probabilita laporan keuangan bermasalah lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang besar

Banyak penelitian terkait kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan lain sebagainya. Berbagai penelitian dengan ukuran KAP membuktikan bahwa ukuran KAP yang besar dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih baik (Ireland dan

Lennox, 2002; Francis 2004; Farbar 2005). Carcello dan Albert (2004) menghubungkan spesialisasi industri auditor dengan *fraud* atas laporan keuangan. Pembuat standard mengusulkan pengetahuan atas suatu industri menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Namun hasil penelitian membuktikan terdapat hubungan yang signifikan negatif antara spesialisasi industri auditor dengan *fraud* atas laporan keuangan. Lin dan Ming (2009) menemukan bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola internal yang lebih lemah cenderung memilih auditor berkualitas rendah sehingga dapat menutupi dan mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan auditor tidak dapat menangkap adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{4a} : Perusahaan yang diaudit KAP *big 4* memiliki probabilita laporan keuangan bermasalah lebih rendah dibandingkan diaudit oleh KAP *non big 4*

Transaksi dengan pihak berelasi memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang yaitu sebagai *opportunis* atau sebagai transaksi yang efisien. Berdasarkan beberapa penelitian seperti Gordon *et al.* (2004) dan Kholbeck dan Mayhew (2004), secara umum menjelaskan transaksi dengan pihak berelasi lebih dipandang sebagai transaksi untuk kepentingan *opportunis* dibandingkan untuk tujuan efisiensi perusahaan. Dimana sebagai transaksi yang *opportunis* dalam hal transaksi dengan pihak berelasi menyebabkan konflik kepentingan yang konsisten dengan *agency theory*. Transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai alat untuk *expropriation of the firm's resources*. Dengan munculnya dugaan adanya *expropriation* ini memungkinkan terjadinya “permainan” pada laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan pengujian bagaimana pengaruh transaksi dengan pihak berelasi dengan *fraud*. Beasley *et al.* (2001) menemukan bahwa kegagalan mengidentifikasi transaksi dengan pihak berelasi merupakan salah satu dari sepuluh defisiensi dari studi yang dilaksanakan oleh

SEC terhadap auditor. Louwers *et al.* (2008) menyimpulkan kegagalan audit dalam mengindikasikan *fraud* atas laporan keuangan terkait transaksi dengan pihak berelasi adalah karena kurangnya sikap *skepticism* dan *due professional care* yang dimiliki oleh auditor. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{5a} : Hubungan transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah

Platt dan Platt (2002) mengartikan *financial distressed* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Jika manajemen menghadapi permasalahan keuangan yang cukup substansial, seperti kegagalan perusahaan, manajemen mungkin memilih jalan singkat, yaitu melakukan *fraud* atau kecurangan seperti dengan memanipulasi laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menunda atau mencegah terjadinya kebangkrutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Maksimovic dan Titman (1991) bahwa pemegang saham pada perusahaan dengan kondisi *financial distressed* memiliki insentif untuk memangkas biaya dan mengurangi kualitas produk perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dengan cepat. Ini menunjukkan ada kemungkinan terdapat pengaturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Thorburn's (2000) menemukan bahwa kecenderungan likuidasi lebih tinggi untuk perusahaan yang melakukan *fraud* pada praktik akuntansinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik dan manajer perusahaan terlibat dalam *fraud* atas laporan keuangan atau aktivitas kriminal lainnya yang dapat mengurangi kecenderungan untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan teori dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, maka hipotesa yang diajukan adalah:

H_{6a} : Perusahaan dalam kondisi *financial distress* memiliki probabilita laporan keuangan bermasalah lebih tinggi dibandingkan perusahaan dalam kondisi *non-financial distress*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi logistik. Model regresi logistik tepat digunakan untuk kasus penyampelan dari dua populasi, yaitu perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah dan perusahaan dengan laporan keuangan tidak bermasalah. Variabel dependen pada penelitian ini merupakan variabel *binary*, yaitu apakah laporan keuangan bermasalah atau tidak.

Dalam penelitian ini hubungan antara independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distress* dengan probabilitas laporan keuangan yang bermasalah akan diuji menggunakan persamaan:

$$P(DTFS)_{i,t} = \alpha + \beta_1 INDEP_{i,t} + \beta_2 BOCFL_{i,t} + \beta_3 BOCSIZE_{i,t} + \beta_4 BIG4_{i,t} + \beta_5 RPT_{i,t} \\ + \beta_6 DISTRESSED_{i,t} + \beta_7 GROWTH_{i,t} + \beta_8 AGE_{i,t} + \beta_9 COMPSIZE_{i,t} \\ + e_{i,t}$$

Dimana laporan keuangan bermasalah $P(DTFS)$ diperoleh dari informasi yang diberikan oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Variabel $INDEP$ diperoleh dari jumlah persentase dewan komisaris independen perusahaan i dalam periode t . Variabel ini merupakan *proxy* dari tingkat independensi dewan komisaris. Proporsi wanita dalam dewan komisaris digambarkan dengan $BOCFL$ yang merupakan persentase jumlah perempuan di dewan komisaris terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan. Besarnya ukuran dewan komisaris yang digambarkan oleh variabel ($BOCSIZE$) ditunjukkan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Kualitas audit digambarkan oleh variabel $BIG4$. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, dimana memberikan nilai 1 untuk KAP *big 4* dan nilai 0 untuk KAP *non big 4*. Variabel RPT merupakan hasil proporsi antara pengurangan *account receivable turn over* dan *account payable turn over* dengan pihak berelasi dalam hari, dengan pengurangan *account*

receivable turn over dan *account payable turn over* perusahaan secara keseluruhan dalam hari.

Financial distress digambarkan oleh variabel DISTRESSED. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, dimana memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang sedang berada dalam kondisi *financial distressed* dan nilai 0 untuk kondisi *non financial distressed*. Pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dari penelitian ini. Variabel GROWTH diperoleh dari pertumbuhan perusahaan. Umur perusahaan *diproxykan* oleh variabel AGE. COMPSIZE merupakan ukuran perusahaan *diproxykan* dengan *logaritma natural* total aset tahun t.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Pertumbuhan (*growth*), umur (*age*), dan ukuran perusahaan (*size*) menjadi variabel kontrol yang mempengaruhi probabilita laporan keuangan bermasalah dalam penelitian ini. Independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distress* pada perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan probabilita laporan keuangan bermasalah sebagai variabel dependen.

3.2.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah probabilita laporan keuangan bermasalah. Penelitian terdahulu menggunakan data yang diperoleh dari Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAER) yang diterbitkan oleh SEC. Pada penelitian ini, penilaian atas laporan keuangan bermasalah merupakan laporan keuangan yang dinilai oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) bermasalah atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasangan dari laporan keuangan bermasalah, yaitu laporan keuangan yang tidak bermasalah menggunakan kriteria yang digunakan oleh Beasley (1996), yaitu:

1. Bursa Efek. Pasangan dari laporan keuangan yang bermasalah dan tidak bermasalah menjual saham pada bursa efek nasional yang sama, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Ukuran Perusahaan. Perusahaan dikategorikan berukuran sama apabila nilai pasar ekuitas perusahaan yang laporan keuangannya tidak bermasalah \pm 30% dari nilai pasar ekuitas perusahaan yang laporan keuangan perusahaannya bermasalah, pada saat setahun sebelum laporan keuangan dikategorikan bermasalah.
3. Industri. Pasangan dari laporan keuangan yang bermasalah dan tidak bermasalah berada pada industri yang sejenis sesuai pengelompokan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode. Pasangan dari laporan keuangan yang bermasalah dan tidak bermasalah menggunakan periode tahun yang sama.

3.2.2 Variabel Independen

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independennya adalah:

1. Independensi Dewan Komisaris
Independensi dewan komisaris pada penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan.
2. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris
Merupakan persentase jumlah perempuan di dewan komisaris terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan.
3. Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran dewan komisaris ditunjukkan dengan jumlah anggota dewan komisaris.

4. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan variabel dummy yang bernilai 1 atau 0. Untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* akan diberi nilai 1. Dan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big 4* dinilai 0. Dimana yang tergolong dalam KAP big 4 antara lain KAP Tanudiredja, Wibisana, & Rekan (PWC); KAP Purwanto, Suherman & Surja (E&Y); KAP Siddharta & Widjaja (KPMG); KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte).

5. Transaksi dengan Pihak Berelasi (RPT)

Related Party Transaction dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang mengacu pada jurnal Lin, Liu, dan Keng (2010) yakni :

Menghitung nilai *AR turn over* dengan pihak berelasi (ARTRPT) dan nilai nilai *AP turn over* dengan pihak berelasi (APTRPT) :

$$\text{ARTRPT} = \frac{\text{Sales with RPT}}{\text{AR with RPT}}$$

$$\text{APTRPT} = \frac{\text{Purchase with RPT}}{\text{AP with RPT}}$$

Kemudian, menjadikan ARTRPT dan APTRPT dalam hari dan mengurangi hasil dari ARTRPT dengan APTRPT.

Dengan tahapan yang sama dilakukan perhitungan untuk *AR turn over* (ART) dan nilai nilai *AP turn over* (APT) perusahaan secara keseluruhan.

Kemudian dibuat proporsi, sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{(\text{ARTRPT} - \text{APTRPT})}{(\text{ART} - \text{APT})}$$

6. *Financial Distress*

Penelitian ini mendefinisikan perusahaan yang mengalami *financial distress* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Platt dan Platt (2002) yaitu dengan indikator sebagai berikut:

1. Mengalami laba operasi negatif selama beberapa tahun
2. Terjadinya suspensi pembagian deviden
3. Sedang mengalami restrukturisasi

Jika perusahaan telah memenuhi salah satu dari ketiga indikator di atas, maka perusahaan dikategorikan mengalami kondisi *financial distress*. Pada penelitian ini kondisi *financial distress* merupakan variabel *dummy*. Perusahaan yang sedang berada pada kondisi *financial distress* akan diberi nilai 1, sedangkan perusahaan dengan kondisi *non-financial distress* diberi nilai 0.

3.2.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu *growth*, *age*, dan *size*.

1. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan.

$$\text{Growth} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}}$$

Di mana: Growth = Pertumbuhan Perusahaan

Salest = Penjualan tahun yang diteliti

Sales_{t-1} = Penjualan tahun sebelumnya

2. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan periode pada saat perusahaan terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode sebelum dikategorikan sebagai laporan keuangan bermasalah oleh Bapepam-LK.

3. Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset pada akhir tahun. Untuk mendapatkan hasil total aset yang lebih baik dan valid, maka langkah untuk mengatasinya adalah melakukan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma dari data tersebut (Ln total aset).

3.3 Pengujian Empiris

Pengujian hipotesis dilakukan secara *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel independennya merupakan kombinasi antara *metrik* dan nominal (*non-metrik*). Selain itu, variabel dependennya merupakan variabel *dummy*. Dalam melaksanakan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan program *SPSS 17.0 for Windows*.

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, besarnya transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distressed*.

3.3.2 Pengujian Hipotesis

3.3.2.1 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Tes statistik *chi square* (χ^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

3.3.2.2 Koefisien Determinasi (*Cox and Snell's R Square (R²) dan Nagelkerke's R square*)

R^2 disini bukan merupakan interpretasi dari koefisien determinasi R^2 pada regresi linear berganda, melainkan *Cox and Snell's R Square (R²)* dan *Nagelkerke's R square*. *Cox and Snell's R Square (R²)* dan *Nagelkerke's R square* menjelaskan secara keseluruhan nilai kemungkinan (*probability*). Nilai maksimum *Cox and Snell's R Square* biasanya lebih kecil dari satu. Sedangkan *Nagelkerke's R square* nilai maksimumnya bisa mencapai satu dan mempunyai kisaran nilai antara 0 dan 1. Nilai koefisien *Nagelkerke's R square* umumnya lebih besar dari nilai koefisien *Cox and Snell's R Square* tapi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi R^2 pada regresi linear berganda.

3.3.2.3 Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's*

Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Begitu juga sebaliknya jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol diterima.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak

3.3.2.4 Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis korelasi *Pearson* dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Baik antara variabel dependen dengan independennya, maupun antar variabel independennya. Korelasi dapat menghasilkan angka positif dan negatif. Jika angka korelasi positif berarti hubungan bersifat searah, dan sebaliknya jika negatif berarti hubungan bersifat tidak searah, artinya jika nilai variabel bebas besar, maka variabel lainnya semakin kecil. Jika koefisien korelasi *Pearson* bernilai 0,8 atau lebih, maka terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel-variabel tersebut.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar yang di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011.
2. Periode akuntansi perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Universitas Indonesia

3. Perusahaan memiliki kelengkapan data-data yang digunakan dalam penelitian. Jika terdapat data yang tidak dapat diakses, maka dikeluarkan dari sampel.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun secara langsung data-data yang diperlukan sebagai variabel penelitian dari laporan tahunan perusahaan. Data yang diambil berupa informasi keuangan, komposisi dewan komisaris, KAP yang telah melakukan audit perusahaan tersebut. Laporan keuangan tahunan perusahaan diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id. Data atas laporan keuangan bermasalah didapatkan melalui informasi yang diberikan oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama. Data penelitian meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan yang diambil dari database Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2011 yang meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sedangkan data penilaian atas laporan keuangan bermasalah merupakan laporan keuangan yang dinilai oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan *non*-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011 sebagai populasi penelitian. Pada penelitian ini, sebanyak 61 perusahaan dikategorikan laporan keuangannya bermasalah oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), namun terdapat 1 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel karena perusahaan telah *delisting* sehingga tidak menerbitkan maupun mempublikasikan laporan keuangan maupun laporan tahunan, baik pada *website* BEI, *website* perusahaan, maupun *google*. Sedangkan untuk pasangan dari laporan keuangan bermasalah, yaitu laporan keuangan yang tidak bermasalah menggunakan kriteria yang digunakan oleh Beasley (1996) yaitu, menjual saham pada bursa efek nasional yang sama (BEI), ukuran perusahaan dikategorikan sama, berada pada industri dan dengan periode laporan keuangan yang sama. Sehingga terdapat 60 pasang perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah dengan perusahaan yang laporan keuangannya tidak bermasalah atau terdapat 120 sampel perusahaan. Penarikan sampel dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi Sampel Penelitian	Jumlah
Jumlah sampel pada tahun 2007	16
Jumlah sampel pada tahun 2008	12
Jumlah sampel pada tahun 2009	22
Jumlah sampel pada tahun 2010	44
Jumlah sampel pada tahun 2011	26
Total Jumlah Sampel atau Perusahaan	120

Dari 120 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, terbagi dalam 8 sektor industri yang dikalsifikasikan oleh BEI. Distribusi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa sampel pada penelitian ini banyak terdapat pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi, yaitu sebesar 23,33% dari keseluruhan sampel penelitian. Hal ini karena perusahaan dengan sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan industri dengan jumlah perusahaan yang cukup dominan dibandingkan dengan industri lain yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk sampel yang paling sedikit digunakan adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar 5% dari total keseluruhan sampel. Hal ini karena jumlah perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian cukup terbatas.

Tabel 4.2
Distribusi Perusahaan Sampel Berdasarkan Sektor Industri

No.	Sektor Industri	Laporan Keuangan Bermasalah	Laporan Keuangan Tidak Bermasalah	Total	Persentase Untuk Total Sampel
1	Pertanian	3	3	6	5,00%
2	Pertambangan	5	5	10	8,33%
3	Industri Dasar dan Kimia	11	11	22	18,33%
4	Aneka Industri	6	6	12	10,00%
5	Industri Barang Konsumsi	6	6	12	10,00%
6	Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan	8	8	16	13,33%
7	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	7	7	14	11,67%
8	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	14	14	28	23,33%
	Jumlah Sampel	60	60	120	100,00%

Pada Tabel 4.3 menggambarkan kategori laporan keuangan bermasalah berdasarkan penilaian Bapepam-LK. Pada tahun 2010 banyak perusahaan yang laporan keuangannya dikategorikan bermasalah, yaitu sebanyak 22 perusahaan. Sedangkan tahun 2008 merupakan tahun dengan jumlah laporan keuangan bermasalah paling rendah diantara tahun lainnya dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 6 perusahaan.

Pada Tabel 4.3 juga dapat dilihat bahwa dari 60 perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah dari tahun 2007-2011, sebanyak 16 perusahaan atau 26,7% adalah berupa salah saji. Salah saji dalam laporan keuangan dapat dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Salah saji dalam laporan keuangan bermasalah ini, menunjukkan persentase yang paling besar diantara kategori laporan keuangan bermasalah lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena auditor yang tidak dapat menemukan adanya salah saji, baik mungkin karena kurang berkualitasnya audit yang dilakukan ataupun karena salah saji yang sengaja dilakukan oleh manajemen, dimana salah saji yang sengaja dilakukan lebih sulit dideteksi sehingga auditor tidak dapat menemukan adanya salah saji. Karena jika auditor dapat menemukan salah saji, auditor dapat memperbaiki laporan keuangan tersebut sebelum dipublikasikan.

Adanya fakta material yang tidak benar serta keterlambatan penyampaian informasi material juga menunjukkan persentase yang cukup besar yaitu sebesar 25% atau 15 perusahaan untuk masing-masing kategori. Fakta material yang tidak benar dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya kemungkinan manajemen memiliki tujuan tertentu dengan menyembunyikan fakta material sebenarnya ataupun terdapat suatu permasalahan tertentu sehingga terlambat dalam menyampaikan informasi yang material. Selain itu terdapat 8 perusahaan atau 13,3% perusahaan dengan kategori laporan keuangan bermasalah terkait pengungkapan transaksi.

Tidak sesuainya laporan keuangan dengan PSAK dari seluruh kategori laporan keuangan bermasalah, menunjukkan persentase yang paling kecil diantara kategori laporan keuangan bermasalah lainnya. Untuk kategori laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK terjadi pada 6 perusahaan atau 10% dari total keseluruhan perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah. Hal ini menunjukkan masih terdapat perusahaan, walaupun hanya sedikit jumlahnya, yang belum mematuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini menunjukkan mungkin karena adanya hal-hal terkait transaksi yang ditutupi oleh manajemen perusahaan.

Tabel 4.3
Kategori Laporan Keuangan Bermasalah

Kategori Laporan Keuangan Bermasalah	Jumlah Sampel						Persentase untuk Total Sampel
	2011	2010	2009	2008	2007	Total	
Salah saji	10	6	0	0	0	16	26,7%
Tidak sesuai dengan PSAK	0	3	2	0	1	6	10,0%
Fakta material tidak benar	0	7	1	3	4	15	25,0%
Pengungkapan transaksi	2	4	1	0	1	8	13,3%
Keterlambatan penyampaian informasi material	1	2	7	3	2	15	25,0%
Total	13	22	11	6	8	60	100%

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah probabilitas laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independensi (INDEP), proporsi wanita dalam dewan komisaris (BOCFL), dan ukuran dewan komisaris (BOCSIZE), kualitas audit (BIG4), transaksi dengan pihak berelasi (RPT), dan kondisi *financial distress* (DISTRESSED). Sedangkan variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan, ukuran, dan umur perusahaan. Dari hasil pengujian statistik deskriptif atas kesembilan variabel, maka diperoleh hasil seperti yang terdapat pada Tabel 4.4.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dari 120 perusahaan sampel, proporsi independensi dewan komisaris (INDEP) pada seluruh perusahaan sampel minimum 25% dan maksimum 67%. Rata-rata jumlah dewan komisaris independen perusahaan sampel sebesar 38,2% Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 25% dan maksimum 67% dengan mean 36,9%. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 25% dan maksimum 67% dengan mean 39,5%. Hal ini berarti secara rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Bapepam LK yang

menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen perusahaan sekurang-kurangnya sebesar 30%.

Hasil proporsi wanita dalam dewan komisaris (BOCFL) yang ditunjukkan dengan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum 0% dan maksimum 50% dengan nilai *mean* 8,3%. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 0% dan maksimum 50% dengan *mean* 6,9%. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 0% dan maksimum 50% dengan *mean* 9,8%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan memiliki dewan komisaris wanita dan proporsi wanita dalam dewan komisaris masih sangat sedikit. Dari 60 perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah, sebanyak 14 perusahaan hanya memiliki 1 orang wanita dalam struktur dewan komisarisnya, 1 perusahaan yang memiliki wanita dalam struktur dewan komisarisnya, sedangkan 45 perusahaan tidak memiliki wanita dalam struktur dewan komisarisnya. Ini menunjukkan masih sedikit sekali jumlah wanita yang berada pada tingkat dewan komisaris pada perusahaan sampel penelitian ini.

Variabel berikutnya adalah ukuran dewan komisaris (BOCSIZE) dengan satuan orang diperoleh minimum 2 orang dan maksimum 8 orang dengan *mean* sebesar 3,87. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 2 dan maksimum 8 dengan *mean* 3,9. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 2 dan maksimum 8 dengan *mean* 3,833. Berdasarkan UU PT No. 40 tahun 2007 dewan komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih, dengan demikian jumlah dewan komisaris baik perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah ataupun tidak telah sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007.

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa variabel kualitas audit (BIG 4) memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1. Hal ini karena variabel kualitas audit merupakan variabel dummy yang hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu 1 dan 0. Selain itu dapat dilihat juga nilai *mean* dari kualitas audit adalah sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 38% dari seluruh observasi pada penelitian ini memiliki kualitas audit yang baik, yaitu perusahaan yang diaudit oleh *Big 4*. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 0 dan

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif (All Sample)				
Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P(DTFS)	0,000	1,000	0,500	0,502
INDEP	0,250	0,670	0,382	0,090
BOCFL	0,000	0,500	0,083	0,149
BOCSIZE	2,000	8,000	3,870	1,550
BIG4	0,000	1,000	0,380	0,486
RPT	-33,590	49,310	0,976	9,270
DISTRESSED	0,000	1,000	0,180	0,382
GROWTH	-0,970	7,940	0,334	1,308
AGE	0,000	29,000	11,730	7,137
COMPSIZE (Rp Milyar)	8	31.768	2.932	5.419
Statistik Deskriptif (Laporan Keuangan Bermasalah)				
Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P(DTFS)	1,000	1,000	1,000	0,000
INDEP	0,250	0,670	0,369	0,090
BOC_FL	0,000	0,500	0,069	0,135
BOCSIZE	2,000	8,000	3,900	1,581
BIG4	0,000	1,000	0,283	0,454
RPT	-28,720	49,310	1,063	8,528
DISTRESSED	0,000	1,000	0,250	0,437
GROWTH	-0,970	7,940	0,481	1,809
AGE	0,000	27,000	11,700	7,381
COMPSIZE (Rp Milyar)	8	31.768	3.503	6.125
Statistik Deskriptif (Laporan Keuangan Tidak Bermasalah)				
Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P(DTFS)	0,000	0,000	0,000	0,000
INDEP	0,250	0,670	0,395	0,089
BOCFL	0,000	0,500	0,098	0,162
BOCSIZE	2,000	8,000	3,833	1,531
BIG4	0,000	1,000	0,467	0,503
RPT	-33,590	36,770	0,889	10,029
DISTRESSED	0,000	1,000	0,100	0,303
GROWTH	-0,420	1,420	0,187	0,367
AGE	0,000	29,000	11,767	6,946
COMPSIZE (Rp Milyar)	28	30.741	2.360	4.590

Jumlah sampel 120 dengan melakukan *winsorized* pada variabel RPT. P(DTFS) = probabilita laporan keuangan bermasalah, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t laporan keuangannya dinyatakan bermasalah dan 0 apabila sebaliknya INDEP = tingkat independensi dewan komisaris, merupakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris, BOCFL = proporsi wanita dalam dewan komisaris, merupakan persentase jumlah wanita dalam dewan komisaris terhadap jumlah dewan komisaris, BOCSIZE = ukuran

dewan komisaris, merupakan jumlah anggota dewan komisaris, BIG4 = kualitas audit perusahaan, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t diaudit oleh KAP yang termasuk *Big 4*, dan 0 apabila sebaliknya, RPT = transaksi dengan pihak berelasi, yang merupakan proporsi antara pengurangan *account receivable turn over* dan *account payable turn over* dengan pihak berelasi dalam hari, dengan pengurangan *account receivable turn over* dan *account payable turn over* perusahaan secara keseluruhan dalam hari, DISTRESSED = kondisi *financial distress* pada perusahaan, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t mengalami kondisi *financial distressed*, dan 0 apabila sebaliknya, GROWTH = pertumbuhan perusahaan, merupakan perubahan jumlah penjualan pada tahun t dengan t-1 terhadap tingkat penjualan perusahaan pada tahun t-1 AGE = umur perusahaan i sejak IPO sampai periode penelitian, COMPSIZE = ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan i pada akhir tahun t.

maksimum 1 dengan mean 28,3%. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 dengan mean 46,7%.

Terkait dengan kualitas audit (BIG4) dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini bahwa dari 60 sampel perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah sebanyak 16 perusahaan atau 26,7% diaudit oleh KAP *BIG 4* dan 44 perusahaan atau 73,3% diaudit oleh KAP *non-Big 4*. Ini menunjukkan sebagian besar laporan keuangan bermasalah memiliki kualitas audit yang kurang baik, yaitu perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *non-Big 4*.

Tabel 4.5
KAP dengan Kategori Laporan Keuangan Bermasalah

Kategori	Jumlah Sampel	Persentase
BIG 4	16	26,7%
NON BIG 4	44	73,3%
TOTAL	60	100,0%

Dari hasil yang dilihat pada Tabel 4.5 di atas menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan yang menggunakan KAP *BIG 4* namun laporan keuangannya dapat dikategorikan bermasalah? Padahal seharusnya KAP *BIG 4* memiliki sistem yang lebih baik dibandingkan dengan sistem KAP *non-Big 4*, sehingga seharusnya mampu mendeteksi bila terdapat suatu temuan. Tabel 4.6 di bawah ini memperlihatkan kategori laporan keuangan bermasalah yang diaudit oleh KAP *Big 4*.

Tabel 4.6
Kategori Laporan Keuangan Bermasalah yang Diaudit oleh KAP *BIG 4*

Kategori Laporan Keuangan Bermasalah	Jumlah Sampel						Persentase untuk Total Sampel
	2011	2010	2009	2008	2007	Total	
Salah saji	2	1	0	0	0	3	18,8%
Tidak sesuai dengan PSAK	0	0	1	0	0	1	6,3%
Fakta material tidak benar	0	1	0	1	0	2	12,5%
Pengungkapan transaksi	1	4	0	0	1	6	37,5%
Keterlambatan penyampaian informasi material	0	1	1	0	2	4	25,0%
Total	3	7	2	1	3	16	100,0%

Dari 16 perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah, persentase kategori bermasalah terbesar adalah terkait dengan pengungkapan transaksi, yaitu sebanyak 6 perusahaan atau 37,5% dari seluruh perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah dan diaudit oleh KAP *Big 4*. Ini menunjukkan mungkin karena adanya hal-hal terkait transaksi yang ditutupi oleh manajemen perusahaan, sehingga auditor tidak dapat menemukan hal tersebut. Selain itu keterlambatan penyampaian informasi material sebanyak 4 perusahaan atau 25%, ini mungkin terdapat kemungkinan auditor kesulitan dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sedangkan untuk kategori ketidaksesuaian dengan PSAK terdapat 1 kasus atau sebesar 6,3%. Walaupun hanya terdapat 1 kasus, menunjukkan masih terdapat KAP *Big 4* yang belum mematuhi standar akuntansi di Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembelajaran dan pelatihan terkait dengan peraturan PSAK dan perkembangan PSAK secara berkala serta supervisi yang lebih ketat.

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat kategori laporan keuangan bermasalah yang diaudit oleh KAP *Non Big 4*. Dari 44 perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah, persentase kategori bermasalah terbesar adalah terkait dengan salah saji dan fakta material yang tidak benar, yaitu masing-masing sebanyak 13 perusahaan atau 29,5% dari seluruh perusahaan yang laporan keuangannya bermasalah dan diaudit oleh KAP *Non Big 4*. Sedangkan untuk kategori ketidaksesuaian dengan PSAK terdapat 5 kasus atau sebesar 11,4%. Penyembunyian

fakta material terkait dengan independensi auditor. Hal ini berarti terdapat kemungkinan auditor membantu manajemen dalam melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Tingginya persentase kategori salah saji dan adanya ketidaksesuaian dengan PSAK ini menunjukkan auditor pada KAP *Non Big 4* cenderung kurang kompeten karena masih terdapat banyak salah saji. Hal ini mungkin karena pada KAP *Non Big 4* beberapa faktor seperti kurangnya supervisi, pelatihan, dan sistem seperti yang dimiliki oleh KAP *Big 4*. Selain itu keterlambatan penyampaian informasi material sebanyak 11 perusahaan atau 25%, ini mungkin terdapat kecenderungan auditor KAP *Non Big 4* terlambat menyampaikan informasi karena kurangnya informasi atau pengetahuan tentang pasar modal. Untuk pengungkapan transaksi terdapat 2 perusahaan atau sebesar 4,5%.

Tabel 4.7
Kategori Laporan Keuangan Bermasalah yang Diaudit oleh KAP Non BIG 4

Kategori Laporan Keuangan Bermasalah	Jumlah Sampel						Persentase untuk Total Sampel
	2011	2010	2009	2008	2007	Total	
Salah saji	8	5	0	0	0	13	29,5%
Tidak sesuai dengan PSAK	0	3	1	0	1	5	11,4%
Fakta material tidak benar	0	6	1	2	4	13	29,5%
Pengungkapan transaksi	1	0	1	0	0	2	4,5%
Keterlambatan penyampaian informasi material	1	1	6	3	0	11	25,0%
Total	10	15	9	5	5	44	100,0%

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa transaksi dengan pihak berelasi (RPT) memiliki nilai minimum -33,59 dan maksimum 49,31 dengan rata-rata 0,976. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum -28,72 dan maksimum 49,31 dengan mean 1,063. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum -33,59 dan maksimum 36,77 dengan mean 0,889. Hal ini menunjukkan bahwa baik perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah maupun tidak bermasalah kerap melakukan hubungan transaksi dengan pihak berelasi.

Kondisi *financial distress* (DISTRESSED) memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1. Hal ini karena variabel kondisi *financial distress* merupakan variabel dummy yang hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu 1 dan 0. Pada Tabel 4.4 juga dapat dilihat nilai *mean* dari kondisi *financial distress* adalah sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 18% dari seluruh observasi pada penelitian ini yang mengalami *financial distress*. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 dengan mean 25%. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1 dengan mean 10%. Dari 60 sampel perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah sebanyak 15 perusahaan atau 25% perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Hal ini menunjukkan laporan keuangan yang bermasalah cenderung sedang mengalami *financial distress*. Perusahaan dengan kondisi *financial distress* mungkin melakukan kecurangan dengan tujuan membuat hasil laporan keuangan yang baik, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Pertumbuhan perusahaan (GROWTH), yang merupakan variabel kontrol pada seluruh perusahaan sampel adalah minimum -9,7% dan maksimum 794% dengan *mean* sebesar 33,4%. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum -9,7% dan maksimum 794% dengan mean 48,1%. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum -4,2% dan maksimum 142% dengan mean 18,7%. Umur perusahaan (AGE) pada seluruh perusahaan sampel adalah minimum 0 tahun dan maksimum 29 tahun dengan rata-rata 11,73 tahun. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum 0 tahun dan maksimum 27 tahun dengan mean 11,7 tahun. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum 0 tahun dan maksimum 29 tahun dengan mean 11,767 tahun. Hasil ini menunjukkan baik perusahaan yang sudah lama maupun baru *go public* laporan keuangannya dapat dikategorikan bermasalah. Hasil ukuran perusahaan (COMPSIZE) dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum Rp 8 Milyar dan nilai maksimum Rp 31,768 Milyar, dengan *mean* sebesar Rp 2,932 Milyar. Untuk sampel laporan keuangan bermasalah, memiliki nilai minimum Rp 8 Milyar dan maksimum Rp 31,768 Milyar dengan mean Rp

3,503 Milyar. Sedangkan untuk sampel laporan keuangan tidak bermasalah, memiliki nilai minimum Rp 28 Milyar dan maksimum Rp 30,741 Milyar dengan mean Rp 2,360 Milyar. Hal ini menunjukkan perusahaan dengan ukuran perusahaan, yang di-*proxy*-kan dengan jumlah aset perusahaan, besar maupun kecil laporan keuangannya dapat dikategorikan bermasalah.

4.3 Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis korelasi *Pearson* dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Jika koefisien korelasi *Pearson* bernilai 0,8 atau lebih, maka terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel-variabel tersebut. Tabel 4.8 menunjukkan apakah variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki korelasi antara satu dengan lainnya.

Dalam Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 4 variabel independen dalam penelitian ini, yaitu INDEP, BOCFL, BOCSIZE, dan DISTRESSED tidak memiliki korelasi terhadap P(DTFS). Namun, Tabel 4.7 menunjukkan variabel independen BIG4 berkorelasi negatif terhadap P(DTFS) pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkualitas audit yang dilakukan, ditandai dengan semakin besar ukuran KAP, semakin kecil pula probabilitas perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah. Selain itu variabel independen DISTRESSED memiliki korelasi positif terhadap P(DTFS) pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu perusahaan mengalami *financial distress*, semakin besar pula probabilitas laporan keuangan bermasalah pada perusahaan tersebut. Untuk ketiga variabel kontrol pada penelitian ini yaitu, GROWTH, AGE, dan COMPSIZE tidak memiliki korelasi terhadap P(DTFS).

Tabel 4.8 juga menunjukkan variabel RPT tidak memiliki korelasi baik terhadap variabel independen lainnya maupun variabel kontrol. Variabel DISTRESSED memiliki korelasi yang negatif terhadap variabel kontrol COMPSIZE dengan tingkat signifikansi 1%. Ini menunjukkan bahwa semakin

besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress*.

Tabel 4.8
Pearson Correlation Matrix

Variabel	P (DTFS)	INDEP	BOCFL	BOC SIZE	BIG4	RPT	DISTRE SSED	GROW TH	AGE	COMP SIZE
P(DTFS)	1									
INDEP	-0,146 (0,112)	1								
BOCFL	-0,098 (0,289)	,236** (0,009)	1							
BOCSIZE	0,022 (0,815)	-0,087 (0,344)	-0,020 (0,828)	1						
BIG4	-0,189* (0,038)	0,003 (0,977)	-0,024 (0,797)	0,279** (0,002)	1					
RPT	0,009 (0,919)	-0,020 (0,830)	0,025 (0,788)	-0,133 (0,149)	0,065 (0,477)	1				
DISTRESSED	0,197* (0,031)	0,002 (0,979)	-0,020 (0,831)	-0,173 (0,058)	-0,221* (0,015)	-0,026 (0,779)	1			
GROWTH	0,113 (0,219)	0,033 (0,724)	0,166 (0,070)	0,170 (0,064)	0,004 (0,962)	-0,04 (0,661)	0,032 (0,731)	1		
AGE	-0,005 (0,959)	0,094 (0,308)	0,007 (0,938)	0,152 (0,098)	0,414** (0,000)	-0,095 (0,304)	-0,103 (0,263)	(0,041) (0,660)	1	
COMP SIZE	-0,022 (0,813)	0,101 (0,270)	0,120 (0,193)	0,444** (0,000)	0,391** (0,000)	-0,042 (0,651)	-0,254** (0,005)	0,219* (0,016)	0,234* (0,010)	1

** . Signifikan pada level $\alpha = 1\%$ (2-tailed).

* . Signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (2-tailed).

Angka di dalam kurung menunjukkan p value

Selanjutnya adalah variabel GROWTH yang memiliki korelasi positif dengan COMP SIZE dengan tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan jika tingkat pertumbuhan perusahaan semakin besar, seiring juga dengan ukuran perusahaan yang semakin besar. Korelasi terakhir yaitu adanya korelasi yang positif antara AGE dengan COMP SIZE dengan tingkat signifikansi 5%. Hal ini

menunjukkan semakin tinggi umur perusahaan, ukuran perusahaan juga semakin bertambah besar.

4.4 Analisis Regresi Logistik

4.4.1 Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Berikut ini adalah hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*:

Tabel 4.9
Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Chi-square	Df	Sig.
3,670	8	0,886

Tabel 4.9 menunjukkan nilai *chi-square* dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sebesar 3,670 dengan signifikansi (p) sebesar 0,886. Berdasarkan hasil tersebut, dengan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat α sebesar 0,05 maka H_0 tidak dapat ditolak (diterima) dan dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai sampelnya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data sampelnya.

4.4.2 Menilai Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara $-2 \text{ Log Likelihood}$ (-2LL) pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$

Universitas Indonesia

(-2LL) pada akhir (*Block Number* = 1). Statistik -2LL dapat digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Penurunan -2LL dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.10
Likelihood Overall Fit Block Number 0

Iteration		-2 Log likelihood
Step 0	1	166,355

Nilai -2LL awal adalah sebesar 166,355. Setelah dimasukkan kesembilan variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 150,640. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan -2LL, yang memungkinkan akan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

Tabel 4.11
Likelihood Overall Fit Block Number 1

Iteration		-2 Log likelihood
Step 1	1	150,923
	2	150,641
	3	150,640
	4	150,640

4.4.3 Pengujian Simultan (*Omnibus Test of Model Coefficient*)

Pengujian simultan dilakukan untuk melihat hasil signifikansi dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian simultan ini dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Omnibus Test of Model Coefficient

	Chi-square	Df	Sig.
Step	15,716	9	0,073
Block	15,716	9	0,073
Model	15,716	9	0,073

Pengujian *Omnibus Test of Model Coefficient* dapat dilihat dari nilai *chi-square* (penurunan nilai $-2 \log \text{likelihood}$) sebesar 15,716 dengan signifikansi sebesar 0,073. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat α , yaitu sebesar 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan probabilita laporan keuangan bermasalah.

4.4.4 Koefisien Determinasi (*Cox and Snell's R Square (R²) dan Nagelkerke's R square*)

Cox and Snell's R Square (R²) dan *Nagelkerke's R square* menjelaskan secara keseluruhan nilai kemungkinan (*probability*). Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke's R square*. Hasil pengujian *Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R square* dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Nilai *Nagelkerke's R square* adalah sebesar 0,164 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 16,4%, sedangkan sisanya sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
150,640 ^a	0,123	0,164

4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini digunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distress* terhadap probabilita laporan keuangan yang bermasalah. Hasil pengujian regresi logistik disajikan pada Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Model Regresi

$$P(DTFS)_{i,t} = \alpha + \beta_1 INDEP_{i,t} + \beta_2 BOCFL_{i,t} + \beta_3 BOCSIZE_{i,t} + \beta_4 BIG4_{i,t} + \beta_5 RPT_{i,t} + \beta_6 DISTRESSED_{i,t} + \beta_7 GROWTH_{i,t} + \beta_8 AGE_{i,t} + \beta_9 COMPSIZE_{i,t} + e_{i,t}$$

Variables	Exp. Sign	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Constant		-2,096	3,65	0,330	1	0,283	0,123
INDEP	-	-3,544	2,335	2,303	1	0,065*	0,029
BOCFL	-	-1,466	1,392	1,110	1	0,146	0,231
BOCSIZE	+	0,072	0,150	0,228	1	0,317	1,074
BIG4	-	-1,141	0,499	5,227	1	0,011**	0,319
RPT	+	0,014	0,021	0,418	1	0,259	1,014
DISTRESSED	+	1,12	0,586	3,659	1	0,028**	3,066
GROWTH	+	0,199	0,195	1,048	1	0,153	1,221
AGE	+	0,033	0,031	1,168	1	0,140	1,034
COMPSIZE	+	0,112	0,141	0,632	1	0,214	1,119

** . Signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (1-tailed).

* . Signifikan pada level $\alpha = 10\%$ (1-tailed).

Jumlah sampel 120 dengan melakukan *winsorized* pada variabel RPT. P(DTFS) = probabilita laporan keuangan bermasalah, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t laporan keuangannya dinyatakan bermasalah dan 0 apabila sebaliknya INDEP = tingkat independensi dewan komisaris, merupakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris, BOCFL = proporsi wanita dalam dewan komisaris, merupakan persentase jumlah wanita dalam dewan komisaris terhadap jumlah dewan komisaris, BOCSIZE = ukuran dewan komisaris, merupakan jumlah anggota dewan komisaris, BIG4 = kualitas audit perusahaan, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t diaudit oleh KAP yang termasuk *Big 4*, dan 0 apabila sebaliknya, RPT = transaksi dengan pihak berelasi, yang merupakan proporsi antara pengurangan *account receivable turn over* dan *account payable turn over* dengan pihak berelasi dalam hari, dengan pengurangan *account receivable turn over* dan *account payable turn over* perusahaan secara keseluruhan dalam hari DISTRESSED = kondisi *financial distress* pada perusahaan, yang merupakan variabel dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan i pada tahun t mengalami kondisi *financial distressed*, dan 0 apabila sebaliknya, GROWTH = pertumbuhan perusahaan, merupakan perubahan jumlah penjualan bada tahn t dengan t-1 terhadap tingkat penjualan perusahaan pada tahun t-1 AGE = umur perusahaan i sejak IPO sampai periode penelitian, COMPSIZE = ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan i pada akhir tahun t.

Dari Tabel 4.14 di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$P(DTFS) = -2,096 - 3,544 \text{ INDEP} - 1,466 \text{ BOCFL} + 0,072 \text{ BOCSIZE} - 1,141 \text{ BIG4} \\ + 0,014 \text{ RPT} + 1,120 \text{ DISTRESSED} + 0,199 \text{ GROWTH} + 0,033 \text{ AGE} + \\ 0,112 \text{ COMPSIZE}$$

4.4.5.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah

Variabel independen yang pertama adalah tingkat independensi dewan komisaris (INDEP). Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh hasil tingkat independensi dewan komisaris (INDEP) memiliki koefisien -3,544 dengan tingkat signifikansi 0,065, dimana nilai tersebut berada di bawah *p-value* 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris (INDEP) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)). Sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat independensi dewan komisaris, maka semakin kecil probabilita laporan keuangan bermasalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Bapepam LK yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen perusahaan sekurang-kurangnya sebesar 30% dari jumlah dewan komisaris. Selain itu komisaris independen pada perusahaan telah menerapkan sifat independensi dengan baik, karena dari hasil uji model regresi dapat dilihat independensi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

Sebagai pengawas, dewan komisaris harus bersifat independen tanpa memihak kepada siapapun agar informasi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen menunjukkan keadaan sebenarnya dan bebas dari kecurangan. Rezaee (2005) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya fraud adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang baik, diantaranya pengawasan oleh *board*. Dengan menciptakan *board* yang cepat tanggap akan kondisi perusahaan maka akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan jauh dari salah saji

laporan keuangan. Luo He *et al.* (2008) menemukan bahwa independensi *board* merupakan pencegah yang paling efektif agar laporan keuangan tidak mengalami penyimpangan (*fraud*). Independensi pada dewan komisaris diharapkan memiliki peran yang efektif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah, karena salah satu tugas dewan komisaris adalah mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat dengan keadaan sebenarnya dan tidak menguntungkan pihak tertentu saja.

Sun *et al.* (2012) menemukan bahwa semakin tingginya jumlah *board* independen, perusahaan cenderung mengungkapkan pengendalian internalnya pada laporan audit. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya komisaris independen, manajemen akan lebih membuka informasi tanpa menutupi informasi yang ada. Dengan demikian, peluang manajemen untuk menutupi kecurangan yang dilakukan akan semakin kecil. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) dan Uzun *et al.* (2004) menemukan bahwa *independent outside director* dapat mengurangi *fraud* pada perusahaan. Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah.

4.4.5.2 Pengaruh Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris terhadap Probabilitas Laporan Keuangan Bermasalah

Variabel independen kedua adalah proporsi wanita dalam dewan komisaris (BOCFL). Pada Tabel 4.14 terlihat bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris (BOCFL) berada tingkat signifikansi 0,146, yang berarti melebihi tingkat signifikansi 0,01, 0,05, dan 0,1. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu proporsi wanita dalam dewan komisaris (BOCFL) berhubungan negatif terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)).

Ye *et al.* (2010) menemukan dengan adanya wanita dalam *board*, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kualitas pendapatan perusahaan. Ini menunjukkan kinerja perusahaan tidak terkait dengan ada atau tanpa adanya wanita dalam dewan komisaris. Carter *et al.* (2010) juga tidak menemukan adanya korelasi antara wanita dalam *board* terhadap performa keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan kinerja dari dewan komisaris terkait dengan laporan keuangan yaitu mengawasi manajemen dalam membuat laporan keuangan tidak terkait dengan proporsi wanita dalam dewan komisaris. Wanita dan pria dianggap memiliki kualifikasi yang sama dalam menjalankan perannya sebagai dewan komisaris. Selain itu pria dan wanita sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Sifat wanita yang dikatakan cenderung lebih memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, menghindari risiko, dan lebih teliti dimiliki juga oleh pria.

Catalyst (2010) dalam Skaggs *et al.* (2012), dikatakan bahwa dalam satu dekade terakhir terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk memasukkan atau menambah *female representation* dalam struktur *board* nya. Namun tidak adanya pengaruh antara proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah ini, mungkin juga disebabkan karena masih sedikit sekali jumlah wanita yang berada pada tingkat dewan komisaris di Indonesia, termasuk pada perusahaan sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak seperti di luar Indonesia yang sudah memiliki proporsi wanita yang lebih banyak pada tingkat *board*.. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini ditolak.

4.4.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Probabilitas Laporan Keuangan Bermasalah

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat ukuran dewan komisaris (BOCSIZE) berada pada tingkat signifikansi 0,317, yang berarti melebihi tingkat signifikansi 0,01, 0,05, dan 0,1. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas laporan

keuangan bermasalah. Artinya perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang besar maupun kecil laporan keuangannya dapat dikategorikan bermasalah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Uzun *et al.* (2004) yang tidak menemukan korelasi antara ukuran *board* dengan kecurangan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Chen *et al.* (2006). Dewan komisaris dengan jumlah anggota besar dapat memberikan konsultasi dan nasehat dari berbagai aspek ataupun pandangan, namun dengan besarnya jumlah anggota dewan komisaris cenderung meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi serta koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan turunnyalah kemampuan dewan komisaris untuk mengendalikan manajemen dalam kesepakatan pengambilan keputusan. Di pihak lain lain, dewan komisaris dengan jumlah anggota kecil cenderung lebih terbatas dalam hal keragaman pandangan, keterampilan, dan pengetahuan, namun akan cenderung lebih mudah dalam menyatukan pendapat.

Perusahaan besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pengeluaran untuk R&D yang tinggi cenderung memiliki *board* dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil (Linck *et al.*, 2008). Hal ini menunjukkan seberapa besarpun ukuran dewan komisaris, jika para anggotanya tidak melaksanakan tugasnya secara efektif, tidak dapat mencegah ataupun mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah ditolak.

4.4.5.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Probabilitas Laporan Keuangan Bermasalah

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil kualitas audit (BIG4) memiliki nilai beta korelasi -1,141 dengan tingkat signifikansi 0,011, dimana nilai tersebut berada di bawah *p-value* 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit (BIG4) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)). Korelasi negatif tersebut mengindikasikan jika

semakin berkualitas audit yang dilakukan, ditandai dengan semakin besar ukuran KAP (BIG4), maka semakin kecil probabilita perusahaan dengan laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)).

Sebagai pihak yang independen, auditor eksternal (akuntan publik) memiliki tugas untuk memberikan opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan, baik terkait kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku umum maupun mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Mitton (2006) menyebutkan perusahaan yang memiliki tingkat kualitas pengungkapan laporan keuangan yang baik cenderung diaudit oleh KAP *Big 6*. Francis (2004) menyatakan laporan keuangan yang diaudit oleh 5 besar KAP memiliki kualitas yang lebih baik. Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena semakin berkualitas audit yang dilakukam maka akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2005) yang menyatakan auditor memiliki pengaruh pada kecurangan yang dilakukan perusahaan, yaitu penipuan yang ditemukan akan dilaporkan, dan akan memperbaiki hal tersebut, dengan memaksa untuk melakukan revisi ataupun penyajian kembali laporan keuangan.

Lin dan Ming (2009) juga menemukan terdapat hubungan antara perusahaan dengan mekanisme tata kelola internal yang lebih lemah cenderung memilih auditor berkualitas rendah sehingga dapat menutupi dan mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan auditor tidak dapat menangkap adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas audit berhubungan negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah diterima.

4.4.5.5 Pengaruh Transaksi dengan Pihak berelasi terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah

Pada Tabel 4.14 terlihat bahwa transaksi dengan pihak berelasi (RPT) berada pada tingkat signifikansi 0,259, yang berarti melebihi tingkat signifikansi

0,01, 0,05, dan 0,1. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henry *et al.* (2007) yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara transaksi dengan pihak berelasi dengan mekanisme terjadinya *fraud* dan keberadaannya tidak mengindikasikan *fraud* atas laporan keuangan. Dalam penelitiannya disebutkan memang memungkinkan bila transaksi dengan pihak berelasi menjadi sebuah “*red flag*” dalam mendeteksi adanya *fraud*. Namun, *fraud* dapat terjadi dengan atau tanpa adanya transaksi dengan pihak berelasi. Hal ini ditunjukkan beberapa penelitian yang hanya menemukan sedikit transaksi fiktif dengan pihak berelasi (Shapiro, 1984 dan Bonner *et al.*, 1998 dalam Henry *et al.* (2007)).

Transaksi dengan pihak berelasi digunakan sebagai alat untuk *expropriation of the firm's resources*. Dengan munculnya dugaan adanya *expropriation* ini memungkinkan terjadinya “permainan” pada laporan keuangan. Namun, transaksi dengan pihak berelasi juga dinilai sebagai transaksi yang dilakukan dalam pertimbangan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sehingga laporan keuangan bermasalah dapat terjadi dengan atau tanpa adanya transaksi dengan pihak berelasi. Implikasinya adalah penting bagi profesi akuntan untuk memahami *nature* dari setiap transaksi dengan pihak berelasi, antara transaksi yang benar digunakan untuk efisiensi kebutuhan perusahaan ataupun transaksi yang mengarah ke penipuan. Selain itu pentingnya evaluasi atas transaksi dengan pihak berelasi untuk memperbaiki struktur tata kelola perusahaan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H₅) yang menyatakan bahwa transaksi dengan pihak berelasi berhubungan positif terhadap probabilitas laporan keuangan bermasalah ditolak.

4.4.5.6 Pengaruh *Financial Distress* terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah

Untuk variabel *financial distress* (DISTRESSED) memiliki nilai beta korelasi 1,120 dengan tingkat signifikansi 0,028, dimana nilai tersebut berada di bawah *p-value* 0,05. Dari Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distressed*, maka semakin besar probabilita laporan keuangan bermasalah pada perusahaan tersebut.

Hui dan Zhao (2008) menyatakan *financial distress* merupakan proses yang membuat dan secara dinamis, membuat perusahaan bangkrut. Pada situasi dimana manajemen menghadapi permasalahan keuangan yang cukup substansial, seperti kegagalan perusahaan, manajemen mungkin memilih jalan singkat, yaitu melakukan *fraud* atau kecurangan seperti dengan memanipulasi laporan keuangan. Jae Kwon (2012) menyatakan pegawai pada perusahaan yang berada ada kondisi *financial distress* memiliki moral yang lebih rendah. Ini menunjukkan terdapat kemungkinan pegawai tersebut melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangannya lebih baik agar perusahaan mereka kembali memiliki modal sehingga para pegawai terhindar dari pemecatan kerja. Maksimovic dan Titman (1991) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemegang saham pada perusahaan dengan kondisi *financial distress* memiliki insentif untuk memangkas biaya dan mengurangi kualitas produk perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dengan cepat. Ini menunjukkan ada kemungkinan terdapat pengaturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.

Bell *et al.* (1991) dalam Beasley (1996) juga menyatakan bahwa performa keuangan yang buruk meningkatkan kemungkinan kecurangan keuangan. Terdapat kemungkinan calon investor tidak menanamkan modal pada perusahaan dengan kondisi *financial distress*, karena melihat tidak adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan pada kondisi keuangan perusahaan yang buruk. Oleh karena itu, manajemen cenderung dapat memanipulasi agar laporan keuangannya dapat terlihat lebih baik, sehingga investor mau menanamkan modalnya pada

perusahaan tersebut. Hasil ini sesuai dengan hipotesis keenam pada penelitian ini yang menyatakan bahwa kondisi *financial distress* berpengaruh positif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah diterima.

4.4.5.7 Pengaruh Pertumbuhan, Umur, dan Ukuran Perusahaan terhadap Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah

Pada penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah pertumbuhan (GROWTH), umur (AGE), dan ukuran perusahaan (COMPSIZE). Untuk pertumbuhan perusahaan (GROWTH), variabel ini tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)). Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) yang juga menggunakan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel kontrol pada penelitiannya. Hal ini menunjukkan seberapa besarpun tingkat pertumbuhan perusahaan tidak membuat perusahaan untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangannya. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, oleh karena itu terdapat kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi pada laporan keuangannya agar mendapatkan suntikan dana yang lebih besar. Di sisi lain, perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang rendah juga senantiasa berusaha meningkatkan penjualannya agar dinilai baik oleh berbagai pihak, ini juga memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi pada laporan keuangannya.

Variabel kontrol yang kedua adalah umur perusahaan (AGE). Pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa umur perusahaan (AGE) tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996) tidak menemukan adanya korelasi antara umur perusahaan, yang dihitung sejak perusahaan *listing* pada bursa efek, dengan kecurangan pada laporan keuangan. Baik perusahaan yang sudah lama ataupun baru terdaftar di bursa efek bisa saja melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Perusahaan publik yang telah lama terdaftar dalam bursa efek menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mencapai target laba, sehingga

terdapat kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan kecurangan. Sedangkan perusahaan yang baru menjual sahamnya kepada publik (terdaftar di bursa efek), mungkin belum mengetahui berbagai peraturan-peraturan yang terdapat di bursa efek. Hal ini menunjukkan selama apapun suatu perusahaan terdaftar pada bursa efek tidak membuat perusahaan untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangannya.

Variabel kontrol yang terakhir adalah ukuran perusahaan (COMPSIZE). Sama halnya dengan kedua variabel kontrol sebelumnya, dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan (COMPSIZE) tidak berpengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah (P(DTFS)). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carcello dan Albert (2004). Hal ini menunjukkan seberapa besarpun ukuran perusahaan tidak membuat perusahaan untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangannya. Baik perusahaan besar maupun kecil bisa saja melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Perusahaan kecil dapat memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal dan membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar dari para pemegang saham, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan kecurangan.

4.4.6 Pengujian Akurasi Model

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilita laporan keuangan bermasalah. Pada kolom terdapat dua nilai prediksi dari variabel dependen, yaitu laporan keuangan bermasalah (1) dan laporan keuangan yang tidak bermasalah (0). Sedangkan pada baris menunjukkan nilai sampel yang sesungguhnya dari variabel dependen. Hasil uji matriks klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji Matriks Klasifikasi

Observasi	Prediksi		Total
	Tidak Bermasalah	Bermasalah	
Laporan Keuangan Tidak Bermasalah	39	21	60
Laporan Keuangan Bermasalah	27	33	60
TOTAL	66	54	120

Tabel 4.15 menunjukkan pengujian keakuratan model. Dapat dilihat bahwa dari 60 sampel yang laporan keuangannya tidak bermasalah, 39 perusahaan secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini, dan 21 sampel tidak tepat diprediksikan oleh model, sedangkan dari 60 sampel yang laporan keuangannya bermasalah, 33 perusahaan dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini, dan hanya 27 perusahaan diperoleh lainnya diestimasikan tidak tepat dari hasil observasinya. Secara keseluruhan berarti bahwa $39 + 33 = 72$ sampel dari 120 sampel dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi logistik yang baik.

Tabel 4.16
Percentage of Accuracy

Kriteria	Jumlah Sampel	Persentase
Laporan Keuangan Tidak Bermasalah	39	65%
Laporan Keuangan Bermasalah	33	55%
TOTAL	72	60%

Pengujian keakuratan model pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari sampel yang laporan keuangannya tidak bermasalah, 65% secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini. Sedangkan untuk sampel yang laporan keuangannya bermasalah, 55,0% perusahaan yang dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini. Secara keseluruhan berarti 60%

sampel dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Data lengkap hasil prediksi model dengan sampel perusahaan dapat dilihat pada lampiran 1. Dalam data tersebut terlihat tingginya persentase ketepatan model menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara data hasil prediksi terhadap data observasinya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distressed* terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Sesuai dengan pembahasan hasil yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Ini menunjukkan bila semakin besar tingkat independensi dewan komisaris, maka semakin kecil probabilita laporan keuangan bermasalah. Artinya, komisaris independen pada perusahaan telah menerapkan sifat independensi pada perusahaan.
2. Proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Hal ini mungkin karena wanita dan pria dianggap memiliki kualifikasi yang sama dalam menjalankan perannya sebagai dewan komisaris. Namun, tidak adanya pengaruh ini mungkin juga disebabkan karena masih sedikit sekali jumlah wanita yang berada pada tingkat dewan komisaris pada perusahaan sampel penelitian.
3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Hal ini menunjukkan seberapa besarpun ukuran dewan komisaris, jika para anggotanya tidak melaksanakan tugasnya secara efektif, tidak dapat mencegah ataupun mendeteksi adanya kemungkinan laporan keuangan yang bermasalah.
4. Kualitas audit signifikan negatif terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Hubungan ini menunjukkan bila semakin besar berkualitas audit

yang dilakukan, maka semakin kecil probabilita laporan keuangan bermasalah.

5. Transaksi dengan pihak berelasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Permasalahan dalam laporan keuangan dapat terjadi dengan atau tanpa adanya transaksi dengan pihak berelasi.
6. *Financial distress* berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distressed*, maka semakin besar probabilita laporan keuangan bermasalah pada perusahaan tersebut

Penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu pertumbuhan, umur, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil regresi model penelitian, tidak ada dari ketiga variabel kontrol tersebut yang memiliki pengaruh terhadap probabilita laporan keuangan bermasalah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya:

1. Periode penelitian ini hanya lima tahun, sehingga belum dapat melihat pengaruh antara variabel independennya, yaitu dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distressed* terhadap variabel dependennya, yaitu probabilita laporan keuangan bermasalah dalam jangka panjang.
2. Nilai *Nagelkerke's R square* yang dihasilkan dalam penelitian ini hanya sebesar sebesar 16,1%, ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel probabilita laporan keuangan yang dikategorikan bermasalah yang dapat dijelaskan oleh perubahan yang terjadi pada variabel independennya, yaitu

independensi dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris, kualitas audit, transaksi dengan pihak berelasi, dan *financial distressed* tidak terlalu tinggi sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya menambah variabel independen lainnya.

3. Hasil pengujian *Omnibus Test of Model Coefficient* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,073 yang lebih besar dari tingkat α , yaitu sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan model tidak tepat digunakan untuk mengukur pengaruh dari seluruh variabel independen. Atau dengan kata lain secara bersama-sama variabel independen tidak dapat menjelaskan probabilitas laporan keuangan bermasalah

5.3 Saran

Hasil penelitian ini memberikan saran bagi beberapa pihak yang diharapkan dapat dilakukan agar hasil penelitian ini berguna bagi beberapa pihak.

1. Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat melakukan pertimbangan dalam menentukan kebijakan - kebijakan perusahaan, terutama terkait dengan pembuatan laporan keuangan, seperti peningkatan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* di lingkungan perusahaan dan pemilihan KAP untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian diharapkan tidak ada kesempatan bagi pihak manapun untuk memanipulasi laporan keuangan.

2. Investor

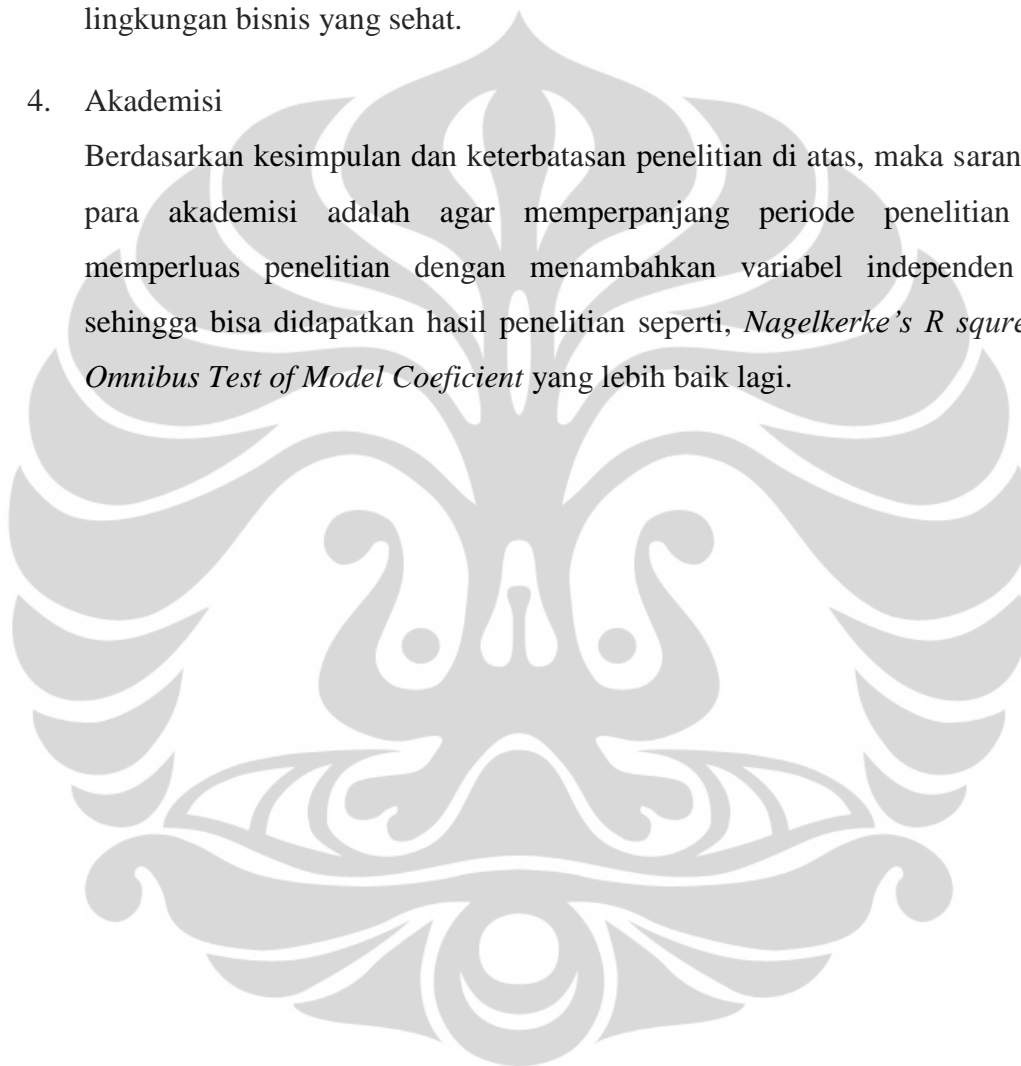
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran bagi para investor adalah untuk mengambil keputusan investasi di perusahaan publik, dapat memperhatikan *corporate governance* atas perusahaan yang ada di perusahaan tersebut serta kebijakan-kebijakan perusahaan, sehingga dapat mengetahui jika terdapat probabilitas laporan keuangan bermasalah.

3. Regulator

Penelitian ini memberikan saran bagi regulator, dalam hal ini Bapepam-LK Bapepam-LK agar menambah, menyesuaikan, atau memperketat peraturan mengenai *corporate governance* dan memperketat pengawasan atas kegiatan perusahaan, terutama perusahaan publik, termasuk dalam hal laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat.

4. Akademisi

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran bagi para akademisi adalah agar memperpanjang periode penelitian dan memperluas penelitian dengan menambahkan variabel independen lain sehingga bisa didapatkan hasil penelitian seperti, *Nagelkerke's R square* dan *Omnibus Test of Model Coefficient* yang lebih baik lagi.



DAFTAR REFERENSI

- Adams, Ren'ee B and Daniel Ferreira. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94, 291–309.
- Arens, A. A., and J. K. Loebbecke. (2009). *Auditing and assurance service an Indonesia adaptation* 12th. Jakarta: Salemba 4.
- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71(4), 443–465.
- Carter, David A., Frank D'Souza, Betty J. Simkins, and W.gary Simpson. (2010). The gender and ethnic diversity of US boards and board committees and firm financial performance. *Corporate Governance: An International Review*, 18(5), 396–414.
- Carcello, Joseph V. and Albert L. Nagy. (2004). Auditor Industry Specialization and fraudulent financial reporting.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Daniel N. Gao, Oliver M. Rui. (2006). Ownership structure, corporate governance, and fraud: evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12, 424– 448.
- Cheung, Y., P. R. Rau, and A. Stouraitis. (2006). Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong”, *Journal of Financial Economics*, 82, 343-386.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2010). Fraudulent financial reporting: 1998 – 2007, an analysis of U.S. Public Companies. United States: Beasley *et al.*
- De Angelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Feliana, Y.K. (2007). “Pengaruh struktur kepemilikan perusahaan dan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap daya informasi akuntansi.” *Working Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Gordon, Elizabeth A., Elaine Henry dan Darius Palia. (2004). Related party transactions: associations with corporate governance and firm value. *EFA Maastricht Meeting Paper & AFA Bostin Meetings Papers*.
- Henry, Elaine, Elizabeth A. Gordon . (2007). The role of related party transactions in fraudulent financial reporting. *Working Paper*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=993532

- Hylas, Robert E. and Robert H. Ashton. (1982). Audit detection of financial statements errors. *The Accounting Review*, Vol 57, No. 4, 751-765.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011) *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- James S. Linck , Jeffy M. Netter, and Tina Yang. (2007). The determinants of board structure. *Journal of Financial Economics* 87, 308–328.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3:4, 305-360.
- Jensen, Michael C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *Journal of Finance* 48, 831–880.
- Jurkus, A. F., Park, J. C. & Woodard, L. S. (2010). Women in top management and agency costs. *Journal of Business Research*, 7-14.
- Kaihatu, Thomas. (2006). *Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia.*” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 No.1 Maret 2006 pp.1-9.
- Kohlbeck, Mark and Brian Mayhew. (2004). Agency costs, contracting, and related party transactions’, AAA205 *FARS Meeting Papers*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=591285
- Komite Nasional Keputusan Governance. (2006). *Pedoman Umum Corporate Governance di Indonesia*.
- Lin, Z. Jun and Ming Liu. (2009). The impact of corporate governance on auditor choice: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 18, 44-59.
- Li, Wen-Yi, Y. Angela Liu, and I Keng. (2010). Related party transaction, firm performance and control mechanism: evidence from Taiwan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 35.
- Linck, J.S., Netter, J.M., Yang, T. (2008). The determinants of board structure. *Journal Finance Economy*, 87 (2), 308–328.
- Louwers, Timothy J., Elaine Henry, Brad J. Reed, and Elizabeth A. Gordon. (2008). Deficiencies in auditing related-party transaction: insight from AAERs. *American Accounting Assocoation*, 2(2), A10-A16.
- Luo He, Réal Labelle, Charles Piot, and Daniel B. Thornton. (2008). Board monitoring, audit committee effectiveness, and financial reporting quality: review and synthesis of empirical evidence. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 1(2).

- Maksimovic, V. and S. Titman. (1991). Financial policy and reputation for product quality. *Review of Financial Studies*, 1991, 175-201.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Platt, Harlan D. and Marjorie B. Platt. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. *Journal of Economics and Finance*, Vol. 26 No. 2 Summer 2002 page 184.
- Rezaee, Zabihollah. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16, 277–298
- Santoso, Singgih. (2012). Aplikasi SPSS pada statistik parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Skaggs, Sheryl, Kevin Stainback, and Phyllis Duncan. (2012). Shaking thins up or busines as usual? The influence of female corporate executives and board of directors on women’s managerial representation.
- Sun, Ye, Yang Yi, and Bin Lin. (2012). Board independence, internal information environment and voluntary disclosure of auditors’ reports on internal controls. *China Journal of Accounting Research*.
- Thorburn, Karin. S. (2000). Bankruptcy auction: costs, recovery rates, and firm survival. *Journal of Financial Economics*, 58, 337-68.
- Uzun, H., S. H. Szewczyk and R. Varma. (2004). Board composition and corporate fraud. *Financial Analysts Journal*, May/June, 33–43.
- Wardhani, Ratna. (2006). Mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financially distressed firms). *Working Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Yatim, P., Kent, P., and Clarkson, P. (2006). Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms. *Managerial Auditing Journal*, 21(7), 757-782.
- Ye, Kangtao, Ran Zhang, and Zabihollah Rezaee. (2010). Does top executive gender diversity affect earnings quality? A large sample analysis of Chinese listed firms. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 26, 47–54.
- Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Financial Economics* 40, 185–212.
- Zanani, Wan, Shahnaz Ismail, Nursyaikin Jamaluddin. 2008. The impact of board composition, ownership, and CEO duality on audit quality: the Malaysian Evidence. *Malaysian Accounting Review*, Vol. 7 No. 2.

KLASIFIKASI MODEL REGRESI DENGAN SAMPEL

No.	Hasil Perhitungan		Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	Hasil Perhitungan
	Probabilita	P>0,5=1 dan 0=sebaliknya	1=Laporan Keuangan Bermasalah dan 0 = sebaliknya	
1	0.48983	0	1	FALSE
2	0.62463	1	0	FALSE
3	0.29446	0	1	FALSE
4	0.43850	0	0	TRUE
5	0.72695	1	1	TRUE
6	0.74655	1	0	FALSE
7	0.62801	1	1	TRUE
8	0.64211	1	0	FALSE
9	0.55056	1	1	TRUE
10	0.42540	0	0	TRUE
11	0.47805	0	1	FALSE
12	0.46204	0	0	TRUE
13	0.69785	1	1	TRUE
14	0.43046	0	0	TRUE
15	0.42710	0	1	FALSE
16	0.34417	0	0	TRUE
17	0.74771	1	1	TRUE
18	0.41305	0	0	TRUE
19	0.46238	0	1	FALSE
20	0.27375	0	0	TRUE
21	0.56158	1	1	TRUE
22	0.47231	0	0	TRUE
23	0.54268	1	1	TRUE
24	0.39239	0	0	TRUE
25	0.32447	0	1	FALSE
26	0.33966	0	0	TRUE
27	0.41933	0	1	FALSE
28	0.26941	0	0	TRUE
29	0.38037	0	1	FALSE
30	0.25750	0	0	TRUE

KLASIFIKASI MODEL REGRESI DENGAN SAMPEL (LANJUTAN)				
No.	Probabilita	Hasil Perhitungan	Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	Hasil Perhitungan
		P>0,5=1 dan 0=sebaliknya	1=Laporan Keuangan Bermasalah dan 0 = sebaliknya	
31	0.87934	1	1	TRUE
32	0.55550	1	0	FALSE
33	0.19812	0	1	FALSE
34	0.55713	1	0	FALSE
35	0.49113	0	1	FALSE
36	0.29586	0	0	TRUE
37	0.91601	1	1	TRUE
38	0.41863	0	0	TRUE
39	0.37505	0	1	FALSE
40	0.21421	0	0	TRUE
41	0.30462	0	1	FALSE
42	0.53804	1	0	FALSE
43	0.55978	1	1	TRUE
44	0.71551	1	0	FALSE
45	0.63886	1	1	TRUE
46	0.42279	0	0	TRUE
47	0.62834	1	1	TRUE
48	0.29026	0	0	TRUE
49	0.35017	0	1	FALSE
50	0.30711	0	0	TRUE
51	0.45639	0	1	FALSE
52	0.44108	0	0	TRUE
53	0.78597	1	1	TRUE
54	0.08625	0	0	TRUE
55	0.30809	0	1	FALSE
56	0.42539	0	0	TRUE
57	0.44434	0	1	FALSE
58	0.58099	1	0	FALSE
59	0.49064	0	1	FALSE
60	0.36470	0	0	TRUE
61	0.85188	1	1	TRUE
62	0.39814	0	0	TRUE
63	0.86398	1	1	TRUE
64	0.50774	1	0	FALSE

KLASIFIKASI MODEL REGRESI DENGAN SAMPEL (LANJUTAN)				
No.	Probabilita	Hasil Perhitungan	Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	Hasil Perhitungan
		P>0,5=1 dan 0=sebaliknya	1=Laporan Keuangan Bermasalah dan 0 = sebaliknya	
65	0.81881	1	1	TRUE
66	0.37355	0	0	TRUE
67	0.49603	0	1	FALSE
68	0.61904	1	0	FALSE
69	0.66076	1	1	TRUE
70	0.37993	0	0	TRUE
71	0.66890	1	1	TRUE
72	0.61477	1	0	FALSE
73	0.34042	0	1	FALSE
74	0.78547	1	0	FALSE
75	0.38965	0	1	FALSE
76	0.23365	0	0	TRUE
77	0.83757	1	1	TRUE
78	0.36071	0	0	TRUE
79	0.79057	1	1	TRUE
80	0.37522	0	0	TRUE
81	0.41485	0	1	FALSE
82	0.40277	0	0	TRUE
83	0.54146	1	1	TRUE
84	0.26860	0	0	TRUE
85	0.61733	1	1	TRUE
86	0.17259	0	0	TRUE
87	0.65176	1	1	TRUE
88	0.30590	0	0	TRUE
89	0.37022	0	1	FALSE
90	0.51775	1	0	FALSE
91	0.46194	0	1	FALSE
92	0.53308	1	0	FALSE
93	0.64941	1	1	TRUE
94	0.37876	0	0	TRUE
95	0.59721	1	1	TRUE
96	0.21912	0	0	TRUE
97	0.77872	1	1	TRUE
98	0.40314	0	0	TRUE

KLASIFIKASI MODEL REGRESI DENGAN SAMPEL (LANJUTAN)				
No.	Probabilita	Hasil Perhitungan	Probabilita Laporan Keuangan Bermasalah	Hasil Perhitungan
		P>0,5=1 dan 0=sebaliknya	1=Laporan Keuangan Bermasalah dan 0 = sebaliknya	
99	0.90845	1	1	TRUE
100	0.34707	0	0	TRUE
101	0.61727	1	1	TRUE
102	0.57153	1	0	FALSE
103	0.41776	0	1	FALSE
104	0.63128	1	0	FALSE
105	0.32047	0	1	FALSE
106	0.57241	1	0	FALSE
107	0.54548	1	1	TRUE
108	0.43657	0	0	TRUE
109	0.73290	1	1	TRUE
110	0.33693	0	0	TRUE
111	0.31134	0	1	FALSE
112	0.54021	1	0	FALSE
113	0.54297	1	1	TRUE
114	0.41867	0	0	TRUE
115	0.38682	0	1	FALSE
116	0.70705	1	0	FALSE
117	0.73487	1	1	TRUE
118	0.60364	1	0	FALSE
119	0.60509	1	1	TRUE
120	0.52044	1	0	FALSE

Daftar lampiran ini merujuk pada hasil Uji Klasifikasi pada Tabel 4.15 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 60 perusahaan sampel yang laporan keuangannya tidak bermasalah, 39 perusahaan atau 65% secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi dan 21 perusahaan diperoleh lainnya diestimasikan tidak tepat dari hasil observasinya. Sedangkan dari 60 sampel yang laporan keuangannya bermasalah, 33 perusahaan dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini, dan hanya 27 perusahaan diperoleh lainnya diestimasikan tidak tepat dari hasil observasinya. Secara keseluruhan berarti bahwa $39 + 33 = 72$ sampel dari 120 sampel dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini.